

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab II Tinjauan Pustaka, memuat kajian pustaka sebagai bagian dari argumentasi penelitian, dan bersumber dari hasil penelitian atau sumber-sumber pustaka lain yang telah ada sebelum penelitian ini dibuat. Secara garis besar, tinjauan pustaka terbagi menjadi dua sub-bab yaitu B.1. Perspektif Teoritis tentang Karakteristik Pulau-pulau Kecil yang di dalamnya membahas tentang pengertian dan klasifikasi pulau-pulau kecil, karakteristik ekosistem pulau-pulau kecil, dan karakteristik sosia pulau-pulau kecil, kemudian B.2. Perspektif Teoritis tentang Pembangunan Pulau-pulau Kecil yang memuat kebijakan fiskal dalam konteks pembangunan pulau-pulau kecil, pembangunan berkelanjutan pulau-pulau kecil, pusat pertumbuhan pulau-pulau kecil, dan diakhiri dengan B.3 Perspektif Pendekatan Pembangunan Pulau-pulau Kecil.

B.1. Perspektif Teoritis tentang Karakteristik Pulau-pulau Kecil

Bagian ini menjelaskan tentang definisi-definisi pulau-pulau kecil, berikut dengan karakteristik ekosistem dan sosial masyarakat yang ada di dalam wilayah pulau-pulau kecil. Pulau kecil digambarkan sebagai wilayah dengan lahan yang rentan pada posisi terpencil dengan ukuran yang kecil serta letak yang terisolir, Octavian *et al.* (2022) menyebutkan bahwa pulau kecil tidak tenggelam ketika pasang air laut terjadi. Jenis pulau kecil berdasarkan ketinggian dibedakan menjadi pulau datar dan pulau berbukit, sementara Hess (1990) berpendapat bahwa pulau kecil harus dihuni kurang dari 200.000 penduduk dengan luas kurang dari 10.000 km² atau kurang dari 5.000 km² menurut pertemuan CSC (1984), mengacu pada

UU No. 27 tahun 2007 pulau kecil memiliki luas kurang dari 2.000 km² beserta kesatuan ekosistemnya.

Beberapa sumber seperti Adisoemarto (2004), Salakory (2022), dan Howorth (2002) mendeskripsikan pulau kecil sebagai wilayah terisolasi dengan luas yang kecil yang memiliki keunikan dan kerentanan ekologi, pulau kecil disebut sangat sensitif terhadap kerusakan dan bencana serta rentan terhadap perubahan iklim dan aktivitas manusia, wilayah ini memiliki skala ekonomi yang kecil dengan pembangunan infrastruktur yang minim karena kapasitas modal dan SDM yang terbatas. Berdasarkan karakteristik sosialnya, pulau kecil biasanya memiliki masyarakat adat yang khas dan unik, Cross M and Nutley, S (1999) dan Piris (2023) menyatakan bahwa karakter sosial terbentuk oleh kondisi fisik alam dan iklimnya dengan mata pencaharian yang hanya untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari (subsisten) (Kakazu, 2007). Kondisi perekonomian masyarakat biasanya didominasi oleh sektor primer dan lebih bersifat ekstraktif dengan teknologi sederhana. Shafitri *et al.* (2020) mengungkapkan bahwa perekonomian mereka dilaksanakan dengan sistem usaha kekerabatan, menurut Benamen dan Dokolamo (2024) masyarakat pulau kecil sangat tergantung dengan sektor perikanan tangkap dengan segala tantangan dan keterbatasan yang ada yang membuat kesejahteraan mereka menjadi rendah. Terlepas dari keterbatasan yang dimiliki, wilayah pulau kecil justru memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, Nagi *et al.* (2023) berpendapat bahwa potensi sumber daya alam wilayah pulau kecil sangat menjanjikan. Dengan potensi ekonomi yang ada, pengelolaan sumberdaya harus

dilakukan dengan baik untuk menghindari konflik antarsektor serta dampak lingkungan yang buruk.

Pembangunan wilayah pulau kecil menjadi perhatian bagi pemerintah terutama karena karakteristik pulau yang demikian khas dengan berbagai kerentanan dan keterbatasannya. Beberapa penelitian terhadap pembangunan di wilayah pulau-pulau kecil secara garis besar terbagi menjadi tiga perspektif, yaitu *deep ecology*, *frontier economy*, dan *resource balance*. Kelompok *deep ecology* lebih menekankan pentingnya pelestarian atau konservasi terhadap ekosistem pulau-pulau kecil dalam pembangunannya. Kelompok ini memandang kebijakan pembangunan wilayah pulau-pulau kecil harus sangat mempertimbangkan faktor lingkungan, kondisi wilayah pulau yang rentan serta perubahan iklim global juga menjadi motif yang kuat bagi kelompok ini dalam menekankan aspek lingkungan. Beberapa penelitian yang mengungkapkan perspektif yang demikian dilakukan oleh Farhan and Lim (2014), Ghina (2003), Robinson *et al.* (2022), Islam *et al.* (2023) Pathak *et al.* (2023), Johnson H (2016), Maguidad *et al* (2015), dan Sovacool (2001).

Pada kelompok *frontier economy*, pembangunan wilayah secara umum selama ini diarahkan untuk menciptakan nilai tambah terhadap sektor perekonomian.. Pembangunan pulau diarahkan untuk menciptakan nilai tambah ekonomi melalui pengembangan potensi pulau terutama untuk kegiatan pariwisata. Studi kasus di Maladewa menjelaskan bahwa pajak pariwisata pulau berkontribusi sebesar 70% terhadap total pendapatan negara (Adedoyin *et al*, 2023). Secara khusus menurut

Syahputra *et al.* (2024) untuk sektor pariwisata membantu biaya operasional transportasi.

Kelompok *resources balance* menekankan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem pulau-pulau kecil baik dari segi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Beberapa pendaptan terkait *Integrated Coastal Zone Management (ICZM)* dan *Small Island Sustainable Development* menjadi sebuah prinsip yang digaungkan oleh kelompok ini dalam pengelolaan wilayah pulau-pulau kecil. Beberapa penelitian yang mengkaji terkait perspektif *resources balance* diantaranya dilakukan oleh Karampela *et al.* (2017), Dahuri (2000), Deboudt *et al.* (2008), Griffith dan Ashe (1993), Sridhar *et al.* (2020), Martinez-Vazquez *et al.* (2021), Fauzel & Trandrayen-Ragoobur (2023) dan lain-lain. Termasuk dalam kategori ini membahas terkait perencanaan spasial sebagai langkah adaptasi terhadap iklim seperti yang dilakukan oleh Nowak *et al.* (2023) dan pembangunan berkelanjutan oleh Hadi (2005).

Fungsi fiskal atau belanja pemerintah termasuk dalam kelompok *resource balance*. Berdasarkan posisi kebijakan fiskal dalam perspektif *resource balance* secara umum mengungkapkan bahwa pembangunan wilayah pulau-pulau kecil banyak dipengaruhi oleh kondisi wilayah pulau kecil itu sendiri, baik secara fisik, sosial-ekonomi, dan lingkungan.

Belanja pemerintah memiliki dampak yang penting bagi pembangunan wilayah pulau-pulau kecil. Sebagaimana dinyatakan oleh Gani (1998) dalam studi kasusnya di Kepulauan Pasifik yang menerangkan bahwa perekonomian masyarakat pulau kecil sangat tergantung pada alokasi fiskal dari pemerintah

melalui subsidi dan kebijakan subsidi fiskal tersebut bisa membantu mengurangi biaya produksi. Pada konteks yang lain, Syahputra *et al.* (2024), menyatakan bahwa subsidi mampu memberikan dampak bagi pertumbuhan ekonomi serta menunjang kegiatan operasional wilayah sehingga menekan beban biaya bagi masyarakat. Selain itu, keberadaan infrastruktur menjadi hal yang tidak boleh dilupakan untuk menunjang kegiatan ekonomi masyarakat, oleh karena itu peran alokasi fiskal sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat.

Kebijakan desentralisasi fiskal menurut Nashrullah (2023), memberikan dampak positif bagi pembangunan. Dalam konteks kajian terhadap pembangunan wilayah pulau-pulau kecil di Kabupaten Kepulauan Sula, Umassangadji *et al* (2022) menyatakan bahwa kebijakan ini juga memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Alokasi fiskal menjadi faktor yang sangat berpengaruh, menurut Abdullah (2014) kesejahteraan masyarakat meningkat ketika dilakukan restrukturisasi fiskal melalui pembangunan infrastruktur yang disinergikan dengan *human capital* secara komprehensif. Studi kasus yang dilakukan oleh Akhmad *et al.* (2013), kebijakan fiskal meningkatkan PDRB pada sektor pertanian dan pendapatan petani, kemudian Nazhika *et al.* (2021) menjelaskan bahwa desentralisasi dan kapasitas fiskal daerah memiliki peran terhadap terciptanya pertumbuhan ekonomi secara inklusif. Wibowo (2024) dalam kajiannya terhadap fungsi fiskal dalam bentuk dana aspirasi yang dimiliki oleh DPRD Kabupaten Blora memiliki pengaruh terhadap dinamika pembangunan di masing-masing wilayah.

Berdasarkan gambaran perspektif teoritis di atas, penelitian ini masuk dalam perspektif *resources balance* yang mengkaji peran belanja daerah/fiskal terhadap

pembangunan wilayah pulau-pulau kecil dikaitkan dengan bagaimana seharusnya penerapan pembangunan wilayah di pulau-pulau kecil dilaksanakan jika mempertimbangkan daya dukung lingkungan secara perspektif ekologis. Selama ini menurut kelompok dalam perpektif *resources balance*, peran fiskal lebih dititikberatkan pada pertimbangan pertumbuhan ekonomi semata. Belum ada yang mengkaitkan dengan pembangunan lingkungan. Penelitian ini mencoba menggagas bahwa belanja daerah harus dikaitkan dengan alokasi pembelanjaannya yang memperhatikan sebaran keruangan secara proporsional sehingga mampu menciptakan pembangunan yang merata dan berkelanjutan bagi pulau-pulau kecil.

B.1.a. Pengertian dan Klasifikasi Pulau-pulau Kecil

Pulau merupakan massa daratan yang terbentuk secara alami dan kelilingi oleh air serta selalu muncul di atas permukaan laut pada saat pasang tertinggi, memiliki kemampuan untuk mencukupi kebutuhan penduduknya (UNCLOS, 1982). Pengertian dari pulau kecil adalah pulau yang memiliki luas kurang dari 10.000 km² dan mempunyai penduduk kurang dari 500.000 jiwa (Beller *et al* 1990, dalam Retraubun, 2001). Pulau-pulau kecil merupakan daratan di tengah laut dengan luas wilayah yang relatif kecil namun tidak tenggelam ketika pasang air laut terjadi (Octavian *et al.*, 2022).

Pulau kecil merupakan salah satu wilayah yang masih menjadi bagian dalam rencana dan agenda pembangunan. Pembangunan dan pengelolaan pulau kecil merupakan proses yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan pendapatan nasional, misalnya dalam bidang pariwisata. Kondisi yang demikian tidak serta merta terus berlangsung tanpa adanya permasalahan

maupun tantangan yang mungkin akan terjadi pada masa yang akan datang. Tingginya intensitas pembangunan pulau kecil akan berdampak juga terhadap pemanfaatan sumber daya alam yang semakin tinggi (Rohman *et al.*, 2016). Hal tersebut akan berakibat langsung terhadap keberlanjutan ekosistem yang ada di dalamnya, seperti terjadinya degradasi lingkungan maupun dampak pada aspek sosial (Miranda *et al.*, 2019). Dengan mengutip Bengen *et al.* (2012), kajian Damayanthi *et al.* (2021) menjelaskan bahwa pemanfaatan pulau kecil terbatas dikarenakan wilayahnya bergantung terhadap pulau besar, letaknya terisolir atau terpisah dari pulau utamanya, serta kondisi lingkungannya sangat rentan. Oleh karena itu, pengelolaan pulau kecil harus dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi yang bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat setempat saja tetapi juga melindungi pulau itu sendiri dari degradasi lingkungan karena faktor alam dan antropogenik (Hidayah, *et al.*, 2016).

Tipe pulau kecil berdasarkan ketinggian di atas permukaan pulau terbagi atas pulau datar dan pulau berbukit. Pulau datar merupakan pulau yang ketinggian datarannya rendah jika diukur dari permukaan laut. Pada umumnya pulau datar berasal dari pulau vulkanik dan non-vulkanik serta rentan terhadap bencana tsunami. Jenis pulau datar meliputi pulau atol (pulau karang berbentuk cincin), pulau karang, pulau alluvium (dari endapan). Sedangkan pulau berbukit adalah pulau dataran tinggi yang memiliki ketinggian relative tinggi dari permukaan laut. Ketinggiannya lebih dari 10 mdpl. Jenis pulau berbukit adalah pulau tektonik, pulau vulkanik, pulau teras terangkat, pulau petabak, dan pulau genesis campuran.

Apabila dibedakan berdasarkan ukurannya maka ukuran pulau ada batasannya. Menurut Hess (1990) batasan untuk pulau kecil adalah dihuni kurang dari 200.000 penduduk dengan luas kurang dari 10.000 km². Batasan pulau kecil yang dikemukakan dalam pertemuan CSC pada tahun 1984 menetapkan bahwa luas pulau kecil maksimal 5.000 km² (Bangen dan Retraubun, 2006). Batasan baku pulau kecil di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Batasan pulau kecil yang ditetapkan dalam undang-undang adalah pulau yang memiliki luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² beserta kesatuan ekosistemnya.

Penetapan batasan pulau kecil berdampak pada pemanfaatan dan pengelolaan pulau kecil. Terdapat beberapa pemanfaatan pulau kecil yang ada di Indonesia yang meliputi tujuan konservasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, budidaya laut, pariwisata, usaha perikanan dan kelautan dan industri perikanan secara lestari, pertanian organik, dan peternakan. Pemanfaatan pulau-pulau kecil pada dasarnya dapat dikelola dengan menata aktivitas manusia yang memanfaatkan ekosistem daratan dan ekosistem perairan sehingga dapat menciptakan keberlanjutan sistem pulau-pulau kecil. Pemanfaatan potensi pulau-pulau kecil dapat didorong untuk menambah devisa negara dalam rangka mempercepat pembangunan wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan kesempatan kerja (Rahmatullah, 2023). Pemanfaatan pulau-pulau kecil merupakan bagian dari strategi untuk meningkatkan kerja sama maritime, memperkuat pertahanan dan keamanan, dan menciptakan

percepatan pertumbuhan perekonomian nasional dalam rangka menciptakan kedaulatan (Nugraha, 2023).

Pulau-pulau kecil memiliki ekosistem yang bersifat alamiah dan buatan. Ekosistem yang bersifat alamiah meliputi terumbu karang, mangrove, pantai berbatu, delta, dan estuaria. Sedangkan ekosistem buatan di pulau-pulau kecil meliputi kawasan pariwisata, kawasan budidaya dan kawasan permukiman. Pulau-pulau kecil juga memiliki keunikan ekologis dengan potensi beragam di setiap pulau-pulainya. Ekologis pada pulau kecil relative homogen dengan posisi terisolir dan didominasi oleh ekosistem laut. Keunikan tersebut menjadi sebuah potensi yang menarik dan memberikan peluang dalam upaya pemanfaatan pulau kecil. Nagi *et al.* (2023) Dalam kajiannya di Pulau Miangas menyebutkan bahwa potensi lahan yang ada dengan berbagai sumberdaya perikanan seperti tiram mutiara, keramba jaring apung, dan rumput laut sangat menjanjikan, namun perlu dilakukan perencanaan yang baik agar pemanfaatan pulau kecil tidak menimbulkan permasalahan lingkungan dan terhindar dari konflik pemanfaatan antarsektor. Keterbatasan lahan yang ada membuat pengembangan pulau kecil perlu benar-benar memerhatikan kondisi ekologi dan daya dukung kawasan (Mugu *et al.*, 2023).

Suatu pulau dapat dikatakan sebagai pulau kecil tidak hanya dilihat dari bentuk dan ukuran pulau-pulainya saja tetapi faktor sosial dan ekonomi yang terkait dengan keterisolasian pulau tersebut secara geografis dapat juga dijadikan indikator dalam menentukan batasan suatu pulau kecil. Sehingga pengertian pulau kecil dapat didefinisikan dari aspek fisik (luas area), jumlah populasi ataupun dari tingkat

pertumbuhan ekonominya (GNP) atau kombinasi dari ketiga variabel ini (Kakazu, 2007).

Secara umum pulau-pulau kecil dapat dikategorisasikan baik dari sisi ekonomi dan sosial maupun dari sisi ekosistem sebagai berikut (Adisoemarto, 2004): (1) terpisah dari pulau utamanya; (2) sumber air sangat terbatas dengan minimnya daerah penangkapan air sehingga air langsung menuju ke laut; (3) sensitif dan rentan terhadap pengaruh dari luar baik alam maupun kegiatan manusia; (4) memiliki nilai ekologi yang tinggi dan spesies endemik; (5) daerah perairannya lebih besar dari daerah daratannya dan terpisah dari pulau utama dan kontinennya; (6) tidak adanya daerah pegunungan yang terisolasi.

Senada dengan penjelasan sebelumnya, Salakory (2022) dalam kajiannya juga mendeskripsikan pulau-pulau kecil sebagai kawasan dengan karakteristik: (1) terpisah dari pulau induk (insuler); (2) tidak memiliki *hinterland* yang jauh dari pantai; (3) tidak mampu mempengaruhi kondisi hidroklimat laut; (4) terbatas daerah tangkapan airnya; (5) sumber air tawar terbatas; (6) eksistensi pulau bergantung kepada ekosistem terumbu karang, mangrove, dan lamun; dan (7) sangat rentan terhadap perubahan iklim baik akibat kondisi alam maupun aktivitas manusia.

Sedangkan menurut (Howorth, 2002), pulau-pulau kecil dapat dikategorikan sebagai berikut: (1) letaknya secara geografis terisolasi; (2) ukuran luasannya kecil; (3) keunikan dan kerentanan ekologinya; (4) pertumbuhan populasi penduduknya dan tingkat kepadatannya; (5) keterbatasan pada sumber daya alam; (6) sangat tergantung kepada sumber daya laut; (7) sangat sensitif terhadap kerusakan bencana

alam; (8) skala ekonomi kecil dengan rendahnya diversifikasi ekonominya; (9) keterbukaan ekonominya; (10) sangat terpengaruh akan perubahan iklim dan peningkatan muka air laut; (11) pembangunan infrastruktur sangat minim, kapasitas yang terbatas akan modal dan SDM.

B.1.b. Karakteristik Ekosistem Pulau-pulau Kecil

Melihat pada setiap kategori karakteristik pulau-pulau kecil maka dapatlah dikatakan bahwa pada setiap pulau kecil terdapat karakteristik yang khusus. Baik dari sisi ekosistemnya dan sosial yang terkait dengan keterisolasian pulau-pulau tersebut, maupun karakteristik ekonomi yang dilakukan oleh penduduknya serta tantangan dan hambatan dalam kegiatan perekonomian yang dijalankan.

Secara umum suatu pulau kecil memiliki banyak ekosistem dalam lingkungannya, dimana setiap ekosistem tersebut saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Hal ini diakibatkan oleh keterbatasan wilayah daratannya serta luasan dari setiap ekosistem tersebut yang terbatas sehingga perubahan di satu ekosistem mempengaruhi ekosistem lainnya yang ada di dekatnya (Balzan, *et al.*, 2018). Kondisi iklim global yang terus berubah menjadi ancaman tersendiri bagi ketahanan ekosistem pulau-pulau kecil terutama akibat dari peningkatan suhu global dan kenaikan permukaan air laut (Kurniadi *et al.*, 2023), pemanasan air laut akan meningkatkan kerentanan terhadap kerusakan terumbu karang sebagai penlindung pantai alami dan beresiko meningkatkan abrasi pantai pada kawasan ini (Muhsin Z *et al.*, 2024).

Ekosistem di pulau-pulau kecil/pesisir dapat berupa ekosistem alami maupun buatan. Ekosistem alami terdiri dari terumbu karang (*coral reefs*), hutan

mangroves, padang lamun (*seagrass beds*), pantai berpasir (*sandy beach*), pantai berbatu (*rocky beach*), formasi pescaprea, hutan dataran rendah, formasi baringtonia, estuaria, laguna, dan delta. Sedangkan ekosistem buatan antara lain dapat berupa kawasan pariwisata, kawasan budidaya (*marine culture*) dan kawasan pemukiman. Baik di ekosistem buatan maupun ekosistem alami terdapat sumber daya alam yang dapat pulih (*renewable resources*) dan sumberdaya alam yang tak dapat pulih (*non-renewable resources*).

Keanekaragaman spesies di pulau-pulau kecil sangatlah tinggi dengan sifat endemisitas yang tinggi pula. Hal ini terkait dengan keterisolasian pulau-pulau kecil tersebut secara geografis yang biasanya telah terpisah dari dataran utamanya sejak ribuan tahun yang lalu. Keterisolasian tersebut telah menghasilkan sifat-sifat baru yang sangat spesifik pada spesies yang ada di pulau-pulau kecil tersebut baik pada flora maupun faunanya dibandingkan dengan spesies lainnya yang berkerabat yang ada di daratan utama/daerah yang dekat dengan pulau kecil tersebut. Keanekaragaman hayati yang tinggi di pulau-pulau kecil ini juga terkait dengan keterisolasian pulau ini secara geografis dan juga dengan beragamnya ekosistem di pulau-pulau ini yang terbatas luasannya sehingga setiap spesies berevolusi dan beradaptasi dengan keterbatasan dan keragaman ekosistem yang ada di dalamnya.

Walaupun memiliki keanekaragaman hayati dengan endemisitasnya yang tinggi, keberadaannya di pulau-pulau kecil sangatlah rentan akan kepunahan. Faktor yang paling berpengaruh adalah akibat dari kesalahan dalam melakukan manajemen pembangunan di pulau-pulau kecil ini. Pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan, ditambah dengan penggunaan bahan anorganik dalam kegiatan

pertanian serta kegiatan wisata yang tidak ramah lingkungan dapat menyebabkan degradasi dari ekosistem yang ada. Hal lainnya adalah faktor bencana alam seperti badai cyclone, tsunami, gempa bumi ataupun akibat dari pemanasan global juga memberikan pengaruh yang nyata terhadap kelangsungan kehidupan spesies yang hidup di pulau-pulau kecil ini karena pengaruh akibat bencana alam sangat terasa dan dirasakan pertama kali oleh pulau-pulau kecil. Hal ini dapat dilihat dari letaknya secara geografis, dimana kebanyakan pulau-pulau kecil terletak di jalur ekuatorial dimana perubahan faktor iklim dan alam sangat dinamis terjadi (Beller, 1990).

Akibat dari ukuran pulau yang sangat terbatas dari sisi geologi dan topografinya maka di kebanyakan pulau kecil ketersediaan air yang baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya menjadi masalah yang penting. Terutama pada pulau-pulau atol yang ketersediaan airnya sangat terbatas karena hanya dilindungi oleh lapisan tanah yang tipis sehingga meskipun curah hujan tinggi tetapi akses terhadap air bersih sangat terbatas karena secara alami tidak tersedianya tempat penyerapan alami dari air hujan tersebut, dimana sebagian besar air hujan menjadi *run-off* dan mengalir secara langsung ke laut (Nation, 1994).

Pada banyak pulau kecil, tipe tanahnya kebanyakan berupa alluvial berupa endapan atau lempung liat yang komposisi nutrisi sangat terbatas terutama terkait dengan komposisi kimia tanah yang menentukan kesuburannya artinya secara kimiawi tanah di pulau kecil sangat miskin unsur hara, hal ini diakibatkan sekali lagi oleh keterbatasan lahan yang terdapat di pulau-pulau kecil tersebut. Tingkat kesuburan tanah untuk kegiatan pertanian sangatlah tergantung kepada komposisi

humus yang berasal dari tanaman hutan sehingga sangatlah tepat bahwa perlindungan alam dan konservasi merupakan peruntukan yang utama dibandingkan dengan kegiatan lainnya karena sangat menentukan taraf hidup masyarakat di bidang pertanian.

B.1.c. Karakteristik Sosial Pulau-pulau Kecil

Karakter sosial masyarakat yang hidup di pulau-pulau kecil terlihat dari adat istiadat yang khas dan unik yang sangat berbeda dengan adat istiadat masyarakat yang berada dataran utamanya. Hubungan keluarga dan kekerabatannya sangat dekat dan saling terkait diantara anggota masyarakatnya yang kemungkinan berasal dari keturunan yang sama saat pertama kali datang ke pulau tersebut di masa yang lampau. Karakter sosial tersebut dibentuk oleh keadaan alam yang terdapat di pulau kecil yang terkait dengan keterbatasan ukuran pulau dan juga lokasinya yang terpencil dan terisolir (Cross, M. and Nutley, S., 1999). Kondisi fisik alam dan iklim pesisir dan pulau-pulau kecil berkontribusi terhadap terbentuknya kebudayaan dan karakteristik masyarakat setempat (Piris, 2023).

Organisasi sosial masyarakat pulau kecil didasarkan pada hukum dan adat tradisional yang berlaku secara turun temurun, termasuk dalam hal kepemilikan sumber daya alam sehingga sesungguhnya tidak ada tanah kosong atau tanpa pemilik di pulau-pulau kecil tersebut walaupun pulau-pulau kecil tersebut tidak dihuni, dan biasanya kepemilikannya bukan pada kepemilikan individu tapi kepemilikan secara komunal/suku. Dalam kajian Maringka *et al.* (2023), masyarakat hukum adat dijelaskan sebagai sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Indonesia akibat dari ikatan

leluhur, hubungan dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, serta memiliki tata kelola pemerintahan adat dan hukum adat yang berlaku.

Mata pencaharian utama penduduknya adalah bertani atau lebih tepatnya berladang dengan jenis-jenis tanaman yang tidak memerlukan teknologi atau perlakuan khusus dan lebih banyak jenisnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (subsisten). Aktivitas subsisten ini memiliki ciri khusus dan peranan yang penting bagi masyarakat yang tinggal di suatu daerah yaitu (Kakazu, 2007): (1) produk subsisten terdiri dari barang dan jasa yang merupakan bentuk dasar dan sangat berharga bagi kehidupan di desa, dimana tidak ada pembandingnya dengan barang-barang yang digunakan dalam sektor perdagangan modern; (2) barang-barang subsisten juga tidak menghasilkan sampah- sampah produksi; (3) banyak barang-barang subsisten merupakan bahan pangan yang bergizi dan murah dibandingkan dengan barang perdagangan lainnya; (4) aktivitas subsistensi merupakan bagian yang integral dalam kegiatan manusia yang tinggal di pedesaan yang tidak dapat dipisahkan dari gaya hidupnya; (5) sudah untuk dimodifikasi dan dimanfaatkan sesuai dengan keinginan.

Pada daerah yang masih memiliki hutan maka hubungan antara hutan dan masyarakatnya sangat erat, dimana biasanya hutan atau tempat-tempat tertentu dianggap sebagai tempatnya nenek moyang mereka dahulu sehingga pola pemanfaatan hutan dilakukan dengan hati-hati. Demikian juga dengan tempat-tempat lainnya seperti sungai ataupun laut memiliki hubungan yang erat dengan faktor kepercayaan mereka bahwa setiap tempat memiliki roh yang menjaganya sehingga sesungguhnya setiap kegiatan/tindakan yang dilakukan oleh masyarakat

tradisional didasarkan pada rasa hormat kepada roh-roh penunggu alam tersebut. Piris (2023) menjelaskan bahwa kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat adat terbentuk secara turun-temurun dianggap akan dapat menjamin pelestarian lingkungan dan wilayah tempat mereka hidup, eksistensi dan peran mereka dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup akan berdampak bagi mereka sendiri serta perlindungan wilayah dalam konteks pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Masalah baru kemudian timbul ketika pihak luar pulau (pemerintah dan swasta) menganggap pembangunan sebagai salah satu upaya peningkatan kesejahteraan dengan mengindahkan faktor-faktor sosial tadi. Antara pemerintah ataupun pihak swasta menggunakan pendekatan yang berbeda dalam melakukan pembangunan terutama yang berkaitan dengan adat dan budaya tradisional masyarakat terpencil. Pemerintah dan swasta memandang bahwa adat dan budaya tradisional menghambat pembangunan dan merupakan hal yang harus diubah dan diganti dengan budaya modern sedangkan masyarakat lokal menganggap bahwa pembangunan tersebut tidak sesuai dengan tradisi maupun kepentingan mereka. Berdasarkan kondisi tersebut pembangunan pulau kecil harus dilakukan dengan pendekatan yang berbasis masyarakat dan berkelanjutan dengan skenario pembangunan yang mampu mengakomodasi kepentingan semua pelaku. Dalam penelitiannya, Kesaulya *et al.* (2023) menerangkan bahwa kebijakan pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil selama ini masih bersifat sentralistik dan kurang memperhatikan kepentingan masyarakat hukum adat, eksistensi dan

kewenangan masyarakat adat tetap diatur dan diakui meskipun dalam praktiknya belum memberikan perlindungan secara optimal.

Usaha pembangunan yang dominan dilakukan di pulau kecil lebih banyak pada usaha eksploitasi barang tambang ataupun hutan. Pembukaan hutan ataupun lahan untuk eksploitasi justru telah merusak tata nilai adat masyarakat di pulau kecil tersebut, akibatnya masyarakat tidak lagi menghargai alam dan budaya lokalnya. Dampak lainnya yang lebih jauh adalah masyarakat tersebut telah kehilangan jati diri dan identitasnya. Permasalahan sosial ekonomi masyarakat di wilayah pulau-pulau kecil terluar juga rawan terhadap terjadinya pemberontakan dan perdagangan ilegal, rendahnya aksesibilitas, informasi, dan pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara membuat masyarakat yang tinggal di wilayah seperti ini memiliki wawasan kebangsaan yang juga rendah, hal ini kemudian menjadikan sebagian mereka merasa bukan bagian dari sistem NKRI (Redjo dan As'ari, 2017). Dalam kajiannya, Maringka *et al.* (2023) mengungkapkan bahwa ketergantungan eksistensi masyarakat adat terhadap sumberdaya dan ekosistem pesisir seharusnya menjadi pertimbangan bagi perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil harus dilaksanakan secara terpadu dengan penyeimbangan ekonomi dan lingkungan serta lebih aplikatif dan adaptif dengan jaminan pelibatan masyarakat di dalamnya.

B.1.d. Karakteristik Ekonomi Pulau-pulau Kecil

Pulau kecil dilihat dari karakter ekonominya memiliki ciri-ciri sebagai berikut yaitu kecilnya pasar domestik, keterbatasan kemampuan untuk memanfaatkan skala ekonominya, terbatasnya sumber daya alam dan tingginya barang-barang

import (terutama makanan dan bahan bakar), terbatasnya kesempatan diversifikasi dan sulitnya pasar, terbatasnya kebijakan kompetisi yang bisa diaplikasikan, tergantung kepada produk ekspor yang minim, ketidakmampuan untuk mempengaruhi harga pasar internasional serta ketidakpastian supply akibat dari keterisolasiannya. Sehingga negara-negara kecil kepulauan yang sangat tergantung pada ekonomi negara lain akan sangat rentan stabilitas perekonomian negara kecil kepulauan tersebut.

Berdasarkan temuan dari kajian yang dilakukan oleh Shafitri *et al.* (2020), perekonomian masyarakat pulau kecil perbatasan di Nunukan dilaksanakan dengan sistem usaha kekerabatan, sistem ini dijalankan oleh masyarakat tradisional untuk menjamin usaha mereka dapat berjalan dengan baik, hal ini kemudian membuat usaha-usaha seperti penangkapan ikan dan budidaya rumput laut tersegregasi berdasarkan kelompok masyarakat dan etnis tertentu.

Dilihat dari ukuran pulaunya yang kecil dan letaknya yang terpencil menyebabkan banyak pulau-pulau kecil memiliki hambatan dari sisi transportasi dan komunikasi, sehingga kegiatan ekonomi dan pembangunan yang dilakukan di pulau-pulau kecil banyak menemui hambatan, maka tidaklah mengherankan bila proses pembangunan berjalan lambat yang kemudian terkait dengan minimnya infrastruktur yang ada. Jaraknya yang jauh dari pusat ekonomi/administrasi juga menyebabkan biaya yang dikeluarkan menjadi lebih tinggi sedangkan tingkat kepadatan penduduknya rendah sehingga prioritas pembangunannya ekonomi tidaklah menarik dan menguntungkan bagi para pengusaha. Aktivitas ekonomi yang dilakukan juga kurang bervariasi dan kurang spesifik dibandingkan dengan

kegiatan ekonomi lainnya hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia dan alam serta keterbatasan pasar. Terbatasnya akses ekonomi lokal dapat dilihat dari jumlah penduduk yang kecil serta rentan terhadap pengaruh bencana alam (Nation, 2004b).

Pulau kecil juga menghadapi masalah dalam administrasi publik, akibat dari keterbatasan sumber daya manusia yang efektif dan efisien sehingga fungsi-fungsi pemerintahan menjadi sangat mahal yang dibandingkan dengan ukuran populasi yang kecil serta tidak sebanding dengan yang memanfaatkannya. Administrasi publik yang dimaksudkan adalah birokrasi pemerintah dan juga organisasi-organisasi non-pemerintah yang terlibat menjalankan fungsi pemerintahan, baik dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik maupun pembangunan ekonomi, sosial maupun bidang-bidang pembangunan yang lain (Dwiyanto, 2007). Pelaksanaan pelayanan publik pada sebuah wilayah yang merupakan kawasan pulau-pulau kecil menghadapi tantangan atas keterbatasan jangkauan pelayanan dari pulau utama sebagai wilayah pusat pelayanan terhadap pulau-pulau lain, kondisi ini menjadikan biaya pelayanan menjadi lebih mahal sementara ukuran populasi yang sedikit menjadikan biaya yang dikeluarkan menjadi tidak efisien. Selain itu, upaya pembangunan infrastruktur untuk menunjang kegiatan masyarakat yang mahal di masing-masing pulau juga menjadi tidak efektif karena pemanfaatannya akan menjadi sangat minimal karena ukuran populasi pulau yang kecil, hal ini kemudian menjadikan fungsi-fungsi aktivitas di pulau kecil menjadi kurang optimal dan menjadi tantangan tersendiri bagi pembangunan.

Pada umumnya kondisi perekonomian sebagian besar pulau kecil masih mengandalkan pada kegiatan primer yaitu di sektor pertanian dan masih dikelola dengan teknologi sederhana. Dominasi terbesar pada sektor pertanian adalah tanaman pangan, perkebunan kelapa dan perikanan. Fokus utama pada kebanyakan penduduknya masih untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari artinya pola pertanian yang dilakukan adalah pertanian subsisten. Sistem barter terkadang masih dilakukan pada beberapa pulau kecil yang terpencil dimana hasil pertanian ataupun hasil hutan seperti rotan, pisang, ayam ditukar dengan gula, beras dan minyak tanah pada pedagang-pedagang yang biasanya merupakan pendatang yang memiliki jaringan dagang dengan kota yang ada di dekat pulau kecil tersebut.

Kegiatan ekonomi yang banyak dilakukan di pulau kecil lebih bersifat ekstraktif, artinya memanfaatkan sumber daya alam yang ada di pulau kecil tersebut. Eksploitasi sumber daya hutan dan barang tambang lebih menjanjikan keuntungan ekonomi bagi para pengusaha yang menanamkan modalnya di pulau ini dibandingkan dengan menanamkan modal pada kegiatan pertanian ataupun kelautan. Hal ini sangat beralasan karena pasar untuk barang tambang dan hasil hutan terutama kayu akan selalu ada dan kemudian resiko kerugian juga sangat minim karena biaya produksinya jauh lebih murah dibandingkan dengan harganya serta memiliki daya tahan lama yang terkait dengan keterisolasian pulau tersebut. Walaupun ada kegiatan ekonomi berupa pengusahaan barang tambang atau hutan di suatu pulau kecil, dampak ekonominya bagi masyarakat di sekitar tidaklah nampak. Masyarakat lebih banyak menjadi penonton dibandingkan menjadi pemain, karena sifat dari kegiatan eksploitasi ekstratif lebih banyak membawa

keuntungan ekonomi keluar dari daerah eksploitasinya karena pengolahan bahan mentah tersebut pengolahannya dilakukan di luar daerah penambangan. Maka tidaklah mengherankan masyarakat yang hidup di sekitar daerah penambangan hutan atau barang tambang keadaan ekonominya tetap memprihatinkan.

Studi kasus di Kabupaten Kepulauan Aru mengungkapkan bahwa ketergantungan masyarakat terhadap sektor perikanan tangkap menghadapi tantangan, bahwa mereka sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca dan dengan keterbatasan teknologi yang ada yang masih menggunakan alat tangkap tradisional membuat kesejahteraan masyarakat menjadi rendah, faktor lain seperti kualitas SDM yang rendah, keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan dan pasar menjadi hambatan bagi masyarakat (Benamen dan Dokolamo, 2024).

Perkembangan perekonomian di pulau-pulau kecil sangat tergantung kepada faktor eksternal yaitu pengusaha pendatang yang melakukan kegiatan ekonomi dan juga adanya kota-kota yang berfungsi sebagai pusat perdagangan dan distribusi hasil perekonomian masyarakat. Adanya ketergantungan yang sangat besar terhadap pusat perdagangan di luar pulau dalam menyalurkan hasil ataupun menyediakan bahan kebutuhan primer yang tidak diproduksi di pulau tersebut menyebabkan faktor transportasi menjadi hal yang sangat penting. Pelayanan transpor ke pulau-pulau kecil yang melebihi waktu tempuh lima jam, sangat kecil peluangnya untuk dapat meraih pertumbuhan dari pusat perdagangan regional.

Pulau-pulau kecil yang ada di Indonesia memiliki perbedaan antara pulau-pulau kecil di Indonesia Barat dengan pulau-pulau kecil di Indonesia Timur. Hal ini terkait dengan hubungan antarpulau yang terjadi kemajuan proses pembangunan

yang telah dilakukan. Di wilayah Indonesia Barat, perkembangan pulau-pulau kecil sangat tergantung pada hubungan dengan pulau besarnya sebagai induk perekonomian maupun administrasi. Di kawasan Indonesia Timur sebagian besar pulau-pulau kecil berada pada laut lepas yang jauh dari pulau induknya sehingga pertumbuhannya relatif lambat, cenderung stagnasi. Maka untuk pengembangannya diperlukan pembangunan infrastruktur yang lengkap dan perhatian politik dan kebijakan sehingga akan mampu menunjang pengelolaan sumberdaya alamnya.

B.2. Perspektif Teoritis Pembangunan Pulau-pulau Kecil

Pada bagian perspektif teoritis pembangunan pulau kecil ini termuat kajian-kajian teoritis mengenai kebijakan fiskal sebagai fokus kajian untuk menilai pembangunan di wilayah pulau-pulau kecil, pembangunan berkelanjutan di wilayah pulau-pulau kecil yang menjelaskan bagaimana sebenarnya yang dimaksud tentang pembangunan berkelanjutan dan pendekatannya dalam melaksanakan pembangunan wilayah pulau-pulau kecil, serta pusat pertumbuhan pulau kecil yang menjelaskan tentang teori-teori tentang pembentukan pusat-pusat pertumbuhan di wilayah pulau-pulau kecil.

B.2.a. Kebijakan Fiskal dalam Konteks Pembangunan Pulau-pulau Kecil

Kondisi kelangkaan (*scarcity*) yaitu suatu kondisi dimana kebutuhan masyarakat tidak terbatas namun sumber daya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan tersebut terbatas. Pada awalnya, konsep ekonomi yang berkembang adalah bagaimana memenuhi kebutuhan tersebut dengan menyerahkannya kepada

mekanisme pasar. Hal ini tentunya berimplikasi pada terbatasnya intervensi pemerintah (Boediono, 1986).

Pada tahun 1776, Adam Smith, seorang ekonom klasik, menerbitkan buku yang berjudul *The Wealth of Nations*, dimana salah satu prinsip yang ditawarkan adalah kebebasan pasar. Smith menyatakan bahwa dengan mengimplementasikan pasar bebas justru akan mendorong teralokasinya sumber daya dengan efektif dan efisien. Permintaan dan penawaran pasar adalah *invisible hand* yang akan menstimulus pasar menuju kesetimbangannya. Prinsip ini menolak campur tangan pemerintah, karena justru akan mengganggu mekanisme pasar itu sendiri. Prinsip ini juga sering dikenal dengan *laissez-faire*. Konsep ini berkembang pesat dan klimaksnya adalah munculnya revolusi industri.

Namun ternyata, mekanisme pasar tidaklah selalu efektif dan efisien. Hal ini disebabkan oleh informasi yang dibutuhkan konsumen dan supplier tidaklah selalu tersedia, sehingga adakalanya menimbulkan kelebihan atau kekurangan persediaan dalam pasar. Informasi kebutuhan konsumen tidak selalu dapat ditangkap oleh supplier, dan sebaliknya. Penyebab lainnya adalah karena adanya kompetisi yang tidak selalu efektif, persaingan yang tidak sehat seperti adanya monopoli akan sangat mengganggu keseimbangan pasar. Selanjutnya penyebab berikutnya adalah karena lahirnya dampak buruk industri seperti isu lingkungan. Penyebab terakhir adalah munculnya kebutuhan masyarakat yang tidak bisa disediakan oleh pasar, seperti fasilitas-fasilitas publik. Contoh dari kegagalan pasar tersebut adalah terjadinya *Great Depression* pada tahun 1930.

Pada tahun 1930, John Maynard Keynes, perintis ilmu makroekonomi, mengeluarkan buku yang berjudul *The General Theory of Employment, Interest, and Money*. Melalui buku ini, Keynes mengeluarkan gagasan tentang perlunya kebijakan intervensi pemerintah. Gagasan ini dilatarbelakangi oleh peristiwa *Great Depression* yang membuat tingkat pengangguran luar bisa tinggi. Keynes menyatakan bahwa cara terbaik untuk mengeluarkan suatu negara dari kondisi resesi (kondisi permintaan dan penawaran di bawah kapasitas optimal) adalah dengan melibatkan pemerintah terutama untuk mendorong kembali posisi permintaan dan penawaran dalam pasar melalui kebijakan belanja dan investasi. Selain itu, untuk mengendalikan dampak sosial dan lingkungan, pemerintah juga harus mulai menekan produk-produk yang membahayakan sosial dan lingkungan dengan kebijakan pajak. Pemerintah juga harus mengambil peranan dalam penyediaan barang-barang publik yang tidak diminati oleh sektor privat, sehingga tentunya membutuhkan sumber-sumber penerimaan. Kebijakan terkait pengeluaran dan penerimaan pemerintah inilah yang dikenal dengan istilah kebijakan fiskal. Gagasan yang dikeluarkan oleh Keynes pada tahun 1930-an merupakan pijakan yang menyadarkan para pelaku ekonomi akan pentingnya peranan pemerintah dalam perekonomian. Kebijakan intervensi pemerintah dalam ekonomi pun berkembang, yang tentunya semakin menyesuaikan dengan kondisi pasar. “

Mengutip pernyataan Mike Moffat dalam artikelnya “*The Government’s Role in Economy*” (2017):

“In the narrowest sense, the government’s role in the economy is to help correct market failures, or situations where private markets cannot maximize the value that they could create for society. This includes providing public goods,

internalizing externalities, and enforcing competition. That said, many societies have accepted a broader role of government in a capitalist economy.”

Moffat menyatakan bahwa peran pemerintah dalam ekonomi sejatinya dibagi menjadi tiga hal, yaitu 1) mengatasi adanya kegagalan pasar akibat pemenuhan kebutuhan pasar yang tidak optimal, termasuk didalamnya penyediaan barang publik, 2) mengendalikan eksternalitas seperti dampak lingkungan akibat industri, serta 3) mendorong persaingan pasar yang sehat.

Benamen dan Dokolamo (2024) menjelaskan bahwa pemerintah seharusnya berperan sebagai dinamisator yang menggerakkan partisipasi publik, ada upaya-upaya yang dilakukan seperti memberikan program bantuan, bimbingan dan pengarahan yang intensif dan efektif kepada masyarakat untuk memelihara dinamika yang ada, juga untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam memaksimalkan potensi kelautan dan perikanan, keseimbangan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat menjadi tanggung jawab pemerintah dalam hal ini.

Menurut Myrdal dalam Sukirno (1993), perlunya campur tangan pemerintah dalam perekonomian adalah dalam kerangka mengurangi kesenjangan antarwilayah. Kurangnya kemampuan wilayah tertinggal/terpencil untuk berkembang secara cepat seperti dibandingkan wilayah yang telah maju disebabkan oleh adanya beberapa keadaan yang disebut sebagai *backwash effects*. Dimana wilayah maju menjadi penarik migrasi bagi wilayah terbelakang/terpencil, sehingga penduduk yang berpendidikan, muda dan berpotensi (kualitas yang terbaik) akan mengalir ke daerah kaya (*brain drain*). Sehingga penduduk yang tinggal di wilayah tertinggal/terpencil adalah penduduk dengan kualitas yang lebih rendah. Demikian juga pengaliran modal di wilayah tertinggal/terpencil akan rendah yang

mengakibatkan tingkat tabungan yang juga rendah, sehingga modal akan berputar, bila investasi di tanamkan di wilayah maju. Ketidaksanggupan wilayah tertinggal/terpencil untuk bersaing dengan wilayah yang lebih maju menjadi lebih serius lagi keadaannya sebagai akibat dari buruknya jaringan pengangkutan dan prasarana penunjang ekonomi lainnya di wilayah tertinggal/terpencil.

Selain pengaruh-pengaruh yang tidak menguntungkan bagi wilayah terpencil seperti di atas, ada juga pengaruh yang menguntungkan yaitu disebut sebagai *spread effects*. Dimana *spread effects* ini merupakan naiknya permintaan atas hasil-hasil pertanian dan industri barang konsumsi pada wilayah terpencil. Tetapi pada umumnya *spread effects* yang terjadi lebih lemah daripada *backwash effects* yang dihasilkan. Sehingga secara keseluruhan pada awalnya pembangunan di wilayah maju akan menghambat wilayah tertinggal/terpencil.

Hirschman dalam Sukirno (1993) berpendapat tentang hal yang sama dengan Myrdal mengenai pembangunan yang akan terjadi bila tidak ada campur tangan dari pemerintah. Pembangunan dipandang dari sudut geografis tidak akan menghasilkan pembangunan ekonomi yang merata pada semua daerah. Dalam analisisnya ada terdapat dua jenis daerah kaya, pada analisisnya disebut sebagai *polarization effects* sedangkan naiknya permintaan akan barang-barang di daerah miskin disebut sebagai *trickle down effect*.

Pendapat Myrdal dan Hirschman di atas, menuju pada satu kesimpulan yang sama yaitu apabila pembangunan suatu wilayah diatur oleh mekanisme pasar akan menimbulkan dampak yang buruk, tidak saja pada wilayah yang tertinggal/terpencil tetapi juga wilayah yang maju dan berkembang berupa: (1) kesulitan untuk

membangun sektor industrinya dan memperbesar kesempatan kerja di wilayahnya, pada satu sisi penduduk akan bertambah terus, sehingga laju tingkat pertumbuhan GNP per kapitanya akan lambat sekali, memunculkan masalah pengangguran yang lebih serius lagi; (2) pertumbuhan ekonomi di wilayah tertinggal/terpencil akan tetap berat sebelah ke sektor pertanian dan industri rumah tangga karena terbentur oleh masalah tidak adanya tenaga kerja yang terampil dan sarana serta prasarana penunjang perekonomian; (3) kesukaran mencari pekerjaan di wilayah tertinggal/terpencil akan menyebabkan tenaga kerja berpindah ke daerah yang lebih kaya, dimana pekerjaan akan lebih mudah diperoleh (*brain drain*), sehingga di wilayah tertinggal/terpencil hanya ada tenaga kerja yang tingkat produktivitasnya rendah.

Intervensi pemerintah dalam ilmu ekonomi makro modern sangat tergantung pada kondisi masing-masing wilayah. Tidak terdapat teori yang secara khusus digunakan untuk memutuskan sejauh apa intervensi pemerintah dalam perekonomian. Pemerintah bisa berperan sebagai regulator, pengumpul pajak, pemilik aset, dan penyedia layanan publik misalnya atau bisa juga berperan sebagai penyedia layanan publik, regulator dan pengawas, dan penggerak pertumbuhan dan stabilitas tergantung negara masing-masing. Berdasarkan praktik yang ada, secara umum, intervensi pemerintah dapat diklasifikasikan dua kelompok, yaitu: 1) adakalanya cukup sebagai regulator dan supervisor dan 2) adakalanya harus bertindak sebagai penyedia dan pengelola (provider dan manajer). Khusus untuk penyedia dan pengelola dibagi menjadi dua fungsi, yaitu 1) penyedia layanan dan

barang publik dan 2) penyedia kebutuhan masyarakat yang tidak dapat dipenuhi oleh pasar.

Dalam konteks pulau-pulau kecil dengan karakteristik wilayah yang masih terbatas, maka akan berpengaruh pada kondisi pasar. Hal ini yang membedakan dengan kondisi daerah lain yang kondisi pasarnya berkembang karena ketersediaan infrastruktur maupun aksesibilitas yang relatif lancar dan terbuka. Intervensi pemerintah sebagai penyedia dan pengelola sangat tergantung dengan kondisi pasar. Apabila pasar sudah efektif, maka intervensi pemerintah cenderung rendah. Pada umumnya pemerintah hanya akan memposisikan dirinya sebagai regulator dan supervisor, sementara untuk penyediaannya diserahkan kepada pasar (sektor privat). Namun apabila pasar belum efektif (misal, masih ada gap antara permintaan masyarakat dan supplainya), maka mau tidak mau pemerintah harus masuk sebagai *market player*, baik turun langsung maupun melalui institusi yang dibentuk, seperti BUMN pada level nasional atau BUMD pada level daerah. Efektif tidaknya suatu pasar pun akan berubah seiring dengan perkembangan ekonomi, maka tingkat intervensi pemerintah juga harus adaptif.

Kebijakan fiskal mempunyai dua bentuk (Sukirno, 1993) yaitu: (1) *automatic stabilizers* (keseimbangan otomatis). Beberapa bentuk pajak dan pembayaran transfer dirancang sedemikian rupa sehingga mereka dengan otomatis dapat menjadi penyeimbang terhadap tenaga kerja dan pendapatan dengan melindungi siklus perputaran kegiatan bisnis. Seperti contohnya adalah: tingkat pajak progresif terhadap pendapatan, dengan otomatis akan menaikkan jumlah penerimaan begitu tingkat pendapatan naik dan akan turun ketika pendapatan menjadi menurun, yang

mana dampak dari fluktuasi perubahan ini menjadi minim. Hal yang sama akan terjadi pada manfaat tidak bekerjanya para pekerja pada sisi pengeluaran yang merupakan kebijakan fiskal pemerintah. Masa reses ini akan menimbulkan keuntungan untuk membantu berlangsungnya pengeluaran yang betul-betul dibutuhkan pada waktu yang tepat (saat diminta). Keseimbangan otomatis walaupun tidak dapat membuktikan sampai sejauh mana masa resesi atau suatu instansi bekerja dan pemerintah harus tetap membangun dengan skala yang besar, maka instrumen diskret merupakan salah satu alat yang dipergunakan bila dibutuhkan; (b) *discretionary action* (tindakan diskresi). Instrumen diskresi berada pada sisi pembayaran dan pajak dari pendapatan serta pengeluaran. Pajak pendapatan menjadi pedoman bagi penyesuaian tingkat atau dengan menyesuaikan pajak dasar bagi penghasilan pendapatan. Pajak barang dan pajak pelayanan dapat disesuaikan dengan mudah. Peraturan pemerintah mengenai pengeluaran juga merupakan instrumen diskresi yang mudah dikenali dan bukan merupakan suatu yang sulit.

Seluruh instrumen fiskal dan lainnya yang berlaku sangat berguna untuk mengontrol/mengendalikan tingkat permintaan pada skala yang sangat luas. Sayangnya masalah kapasitas produksi di wilayah tertinggal/terpencil dan kapasitas produksi pada wilayah maju tidak dapat dengan mudah diperluas atau dipersempit terhadap permintaan agregat. Perluasan dari permintaan agregat dalam usaha untuk memperbaiki tingkat pengangguran di wilayah tertinggal/terpencil akan menyebabkan inflasi dan masalah tingkat pembayaran.

Kebijakan fiskal menurut Sukirno (1993) adalah langkah-langkah pemerintah mengelola pengeluaran dan perpajakan atau penggunaan instrumen fiskal untuk mempengaruhi bekerjanya sistem ekonomi agar memaksimalkan kesejahteraan ekonomi. Kebijakan fiskal didefinisikan juga sebagai pengelolaan anggaran pemerintah untuk mempengaruhi suatu perekonomian, termasuk kebijakan perpajakan yang dipungut dan dihimpun, pembayaran transfer, pembelian barang-barang dan jasa-jasa oleh pemerintah, serta ukuran defisit dan pembiayaan anggaran, yang mencakup semua level pemerintahan. Instrumen fiskal adalah perpajakan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal diterapkan oleh pemerintah sebagai bukti untuk mengatur jalannya perekonomian negara.

Kebijakan fiskal dilaksanakan melalui APBN yang mempunyai dua sisi yaitu sisi pengeluaran dan sisi pendapatan. Sisi pengeluaran terdiri dari tiga pos yaitu: (1) pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang/jasa; (2) pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai, (3) pengeluaran *transfer payment* seperti subsidi, pembayaran pensiun, dan lain-lainnya. Sisi pemasukan terdiri dari: (1) pajak, (2) pinjaman masyarakat, (3) pinjaman luar negeri, (4) pinjaman bank sentral (Boediono, 1986).

Pengeluaran pemerintah ini dapat memberi dampak makro pada ekonomi penduduk, karena pemerintah mengedarkan “uang inti” kepada masyarakat (Samiadji, 1994). Melalui kegiatan ini terjadi peningkatan permintaan agregat (Z), tingkat harga (P) dan tingkat produksi (Q). Pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa (G) akan menggeser kurve Z dan akan menentukan P dan Q yang baru. Selanjutnya P dan Q baru akan mempengaruhi permintaan uang (L) dan selanjutnya perubahan L akan mengubah tingkat bunga (r), P dan Q . Perubahan

ini berlangsung secara siklus pertama, kedua, ketiga sampai tercapai keseimbangan.

Kenaikan G pada putaran pertama terjadi perubahan Z sebesar:

$$Z = (1-c)^{-1}.G \dots\dots\dots(1)$$

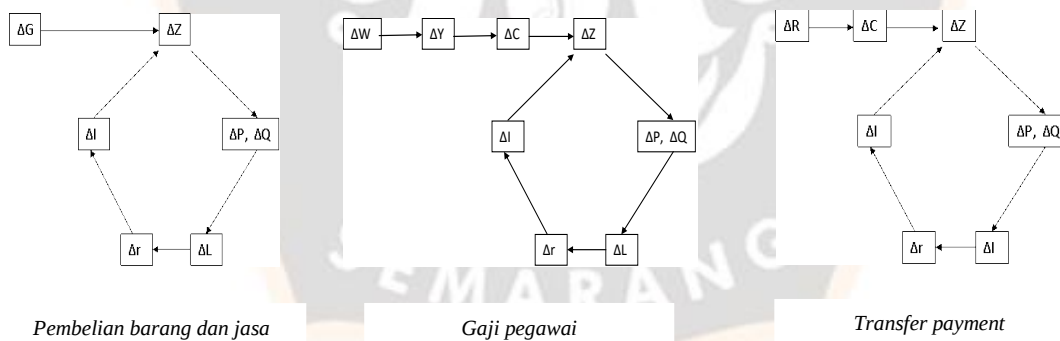
Kelipatan $(1-c)^{-1}$ dikenal sebagai faktor pelipat, dimana c adalah *marginal propensity to consume* (MPC) yang besarnya $0 < c < 1$.

Dengan pola yang sama, pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai (W) dan *transfer of payment* (R) akan mempengaruhi permintaan agregat (Z) dengan perubahan sebesar:

$$Z = (1-c)^{-c}.W \dots\dots\dots(2)$$

$$Z = (1-c)^{-c}.R \dots\dots\dots(3)$$

Faktor pelipat untuk W dan R yaitu $(1-c)^{-c}$ lebih kecil dari *multiplier* untuk pembelian barang dan jasa (G) yaitu $(1-c)^{-1}$.



Sumber: Boediono, 1986

Gambar 2. 1
Permintaan Agregat untuk Pembelian Barang dan Jasa, Gaji Pegawai dan Transfer Payment

Dari gambaran di atas, dapat disimpulkan bahwa penambahan peredaran uang (uang inti) akan meningkatkan volume ekonomi yang pada akhirnya meningkatkan ekonomi masyarakat. Uang inti melalui alokasi fiskal daerah yang bersumber dari

pembiayaan publik dapat berbentuk belanja barang dan jasa, gaji pegawai maupun *transfer payment*.

Berdasarkan asumsi tersebut, maka terminologi kebijakan fiskal yang biasanya diberlakukan untuk ekonomi nasional dianalogkan dengan terminologi fiskal daerah, *misalnya* APBN menjadi APBD bagi daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota. Pembedanya dengan sistem fiskal nasional adalah, sumber-sumber pemasukan di daerah lebih terbatas disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Persoalan berikutnya, adalah bagaimana meningkatkan atau memperluas sumber-sumber pendapatan daerah agar mampu mengadakan pengeluaran-pengeluaran pembangunan sehingga tercipta *multiplier effect* di daerah? Untuk itu, maka mesti dilihat peluang-peluang sumber pemasukan yang dimiliki Daerah.

Umumnya pulau-pulau kecil di kawasan perbatasan yang berstatus daerah otonom sumber informasi pemasukan dapat dilihat dari APBD. Dalam realisasi APBD, struktur pengeluaran/ pembiayaan pembangunannya sekaligus dapat mencerminkan *sumber* pendanaannya berupa: pembiayaan pembangunan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pembiayaan pembangunan yang berasal dari bantuan Pusat. Pembiayaan pembangunan yang dari Pusat tidak tercatat dalam APBD. Dari sumber pembiayaan tersebut, PAD yang paling bisa diandalkan untuk terus meningkat serta menunjukkan kemandirian daerah. Persoalan berikutnya, adalah sumber apa yang mampu menaikkan perolehan PAD, tergantung pada *strenghts* yang dimiliki daerah. Salah satu kekuatan sumber pembiayaan PAD bagi pulau kecil adalah pembiayaan konvensional dan nonkonvensional.

Pembiayaan konvensional merupakan sumber yang secara resmi meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sedangkan pendapatan nonkonvensional dapat berupa kekayaan daerah, pendapatan dan hutang daerah. Ketergantungan wilayah pulau-pulau kecil terhadap pembiayaan fiskal konvensional terjadi akibat keterbatasan sumberdaya yang dapat dimanfaatkan, terlebih lagi posisi pulau-pulau kecil seringkali berada sangat jauh dari pulau besar. Masalah aksesibilitas ini tentunya menciptakan keterbatasan tersendiri bagi pembangunan wilayah, selain itu SDM yang kurang memadai baik secara kualitas maupun kuantitas juga membuat fungsi-fungsi aktivitas dan pemanfaatan sumber daya daerah menjadi tidak optimal, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pembangunan wilayah pulau-pulau kecil kemudian seringkali juga sulit untuk dicapai.

Kenyataan yang ada, pulau-pulau kecil di kawasan perbatasan negara lebih banyak *weaknesses*-nya daripada *strenghts*-nya. Namun demikian, dibalik kelemahan tersebut terdapat kekuatan berupa *comparative advantage*. Keberadaan sumber daya alam yang dimiliki pulau-pulau kecil secara ekstraktif seperti sektor perikanan dan kelautan, pertambangan dan energi, pariwisata maupun agroindustri dapat dimanfaatkan. Melalui pengembangan sumber daya alam tersebut, diharapkan dapat diperoleh peningkatan PAD ini yang bisa disebarkan kembali kepada masyarakat melalui pengeluaran pembangunan untuk pembelian barang/jasa, menambah (bukan menaikkan) gaji pegawai, juga melalui *transfer of payment*. Masalah yang dihadapi untuk pengembangan sumber daya alam di pulau-pulau kecil adalah pada kualitas sumber daya manusia, sehingga diperlukan dukungan

pertukaran pengetahuan, keterampilan dan teknologi selain upaya pemerataan sebaran penduduk.

B.2.b. Pembangunan Berkelanjutan Pulau-pulau Kecil

Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Konsep pembangunan berkelanjutan ini berupaya untuk mensinergikan antara tiga aspek yaitu (Djajadiningrat, 2005): (1) keseimbangan ekologi yang meliputi perlindungan sumber daya lingkungan di tingkat lokal maupun global serta mempertahankan biodiversitas; (2) kemajuan sosial yang meliputi pembangunan sumber daya manusia, hukum pendidikan dan pengurangan kemiskinan dan ketidakadilan; (3) kemampuan ekonomi yang meliputi pembangunan ekonomi, penciptaan tenaga kerja, efisiensi ekonomi dan mengintegrasikan nilai ekonomi sosial dan ekologi. Beberapa negara juga memasukkan aspek keragaman budaya yang meliputi penghargaan akan kebebasan, bahasa lokal dan juga keragaman pola pembangunan daerah. Prinsip pembangunan berkelanjutan pada hakikatnya dilaksanakan untuk pemenuhan kebutuhan generasi saat ini tanpa menghilangkan ketersediaan sumber daya untuk generasi yang akan datang dengan orientasi pembangunan yang mengedepankan pemanfaatan yang bertanggung jawab dengan memperhatikan hubungan manusia dengan lingkungan (Pramesti *et al.*, 2021).

Dalam konsep ini juga sekaligus menyatakan bahwa prinsip demokrasi merupakan tujuan dan sekaligus cara untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Adanya pengakuan akan akses masyarakat terhadap hak dasarnya sebagai manusia

yang meliputi hak sosial dan politik, hak ekonomi dan budaya dan juga hak akan lingkungan. Sehingga konsep pembangunan berkelanjutan juga menuntut/mendukung adanya proses partisipasi dari semua aktor yang berperan baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan berkelanjutan (Menegat, 2002). Hal yang senada diungkapkan oleh Furqon *et al.* (2023) bahwa partisipasi publik menjadi salah satu hal yang penting dalam pembangunan berkelanjutan yang akan menentukan keberhasilan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sehingga pelaksanaan pembangunan juga didasarkan atas kebutuhan masyarakat. Perencanaan partisipatif dan pelibatan masyarakat memungkinkan ketercapaian pembangunan akan lebih baik dikarenakan ikatan yang terbangun dan rasa tanggungjawab bersama yang dimiliki (Ernawati, 2023).

Konsep pembangunan berkelanjutan ini sendiri awalnya muncul dari kesadaran global akan adanya kerusakan lingkungan dan ketimpangan pembangunan yang terjadi di dunia ini. Ada dua fenomena yang melatarbelakangi munculnya konsep ini yaitu: (1) ketimpangan pembangunan antara dunia bagian selatan dan dunia bagian utara serta lemahnya pembangunan sumber daya manusia; (2) terjadinya krisis ekologis dan pentingnya untuk menyelamatkan lingkungan dan bumi.

Kesadaran akan kedua hal diatas kemudian memunculkan konsep pembangunan ekologi (*eco development*) yang berupaya menghubungkan antara pembangunan dengan terjadinya krisis kerusakan lingkungan pada konferensi dunia tentang lingkungan manusia (*human development*) di Stockholm pada tahun 1972, sedangkan konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*)

lahir/dipopulerkan oleh laporan “*Our Common Future*” dalam komisi lingkungan dan pembangunan pada pertemuan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1987 dan di pertemuan dunia tentang lingkungan dan pembangunan pada konferensi tingkat tinggi tentang bumi di Rio de Janeiro Brazil tahun 1992.

Agenda 21 merefleksikan kesepakatan global dan konsesus politik dalam kerja sama pembangunan dan lingkungan. Agenda 21 merupakan program aksi dari kesepakatan semua peserta konferensi bumi yang berjumlah 176 negara yang dilaksanakan oleh pemerintah, institusi pembangunan, organisasi PBB dan juga masyarakat sipil. Program aksi ini terdiri dari 27 prinsip dan 40 bab yang memformulasikan 2.500 rekomendasi. Ada 4 hal penting yang dibahas dalam agenda 21 ini yaitu (HCCI, 2005): (1) konservasi dan perlindungan sumber daya alam untuk pembangunan; (2) partisipasi dari “majeur group” untuk bekerja sama dan melaksanakan pembangunan lewat jaringan kerjasama dan memberikan pengaruhnya pada semua negara; (3) mengaplikasikan semua cara yang mungkin untuk merealisasikan aksi yang memungkinkan dalam pembangunan yang berkelanjutan; (4) bidang ekonomi dan sosial dari pembangunan.

Menindaklanjuti Agenda 21 yang dihasilkan dari konferensi dunia tentang pembangunan dan lingkungan yang dilaksanakan di Rio de Janeiro pada tahun 1992, dimana pada bab 17 bagian G dari Agenda 21 disebutkan bahwa negara kecil kepulauan (*Small Island Developing State*) dan pulau-pulau kecil merupakan hal khusus dalam proses pembangunan berkelanjutan akibat dari keterbatasan dan kerentanan ekologi, keterbatasan sumber daya, keterisolasi dari pasar serta keterisolasiannya secara geografis. Maka pada tahun 1994 dilakukan pertemuan

konferensi dunia pertama yang membahas mengenai Agenda 21 yang dilaksanakan di Barbados yang dihadiri oleh 111 negara yang membahas secara khusus tentang pembangunan berkelanjutan di pulau-pulau/negara-negara kecil kepulauan. Berkaitan dengan kebijakan fiskal, permasalahan pulau kecil pada Agenda 21 terkait dengan keterbatasan sumber daya dan keterbatasan pasar serta isolasi geografis dalam menyediakan dan mengakses sumber pembiayaan pembangunan.

Beberapa prinsip dasar yang dihasilkan dari pertemuan di Barbados tersebut yang terkait dengan pembangunan berkelanjutan adalah: (1) keberlangsungan dari negara kecil kepulauan sangat berkaitan dengan sumber daya manusia dan warisan budayanya yang merupakan aset yang paling penting dimana saat ini aset tersebut dalam tekanan dan setiap usaha yang dilakukan haruslah memastikan bahwa peran dari masyarakat memainkan peranan yang utama dalam proses pembangunan berkelanjutan; (2) program dari pembangunan berkelanjutan haruslah dapat meningkatkan kualitas dari kehidupan masyarakatnya termasuk kesehatan, taraf hidup dan keamanan; (3) perhatian yang penuh haruslah diberikan pada persamaan gender dan peranan dan kontribusi dari pihak wanita demikian juga pada kebutuhannya dan kelompok yang lainnya termasuk anak-anak, pemuda dan penduduk lokal.

Secara ekonomi wilayah, ketertinggalan pulau-pulau kecil menghadapi berbagai kendala yang sangat kompleks (Prijanta, 2005). Beberapa penelitian tentang ketertinggalan ini antara lain skala ekonomi dan potensi aglomerasi yang kecil (de Haan, 1993) dan Winters and Martin (2003), isolasi fisik dan sosial, dinamika kependudukan yang lamban dan tingginya migrasi keluar (Lockhart, 1993

dan 1993a), terbatasnya peluang diversifikasi (Poon, 1990), terbatasnya potensi air tanah (Graenger (1983). Bass and Dalal-Clayton (1995) memberikan penekanan yang kuat untuk mengedepankan keberlanjutan daripada pertumbuhan ekonomi di wilayah pulau-pulau kecil. Pada sisi lain adanya globalisasi berupa perubahan fisik maupun ekonomi skala global menjadi tantangan atas kerentananan yang akan dihadapi pulau-pulau kecil (World Bank, 2000). Ukuran pulau kecil menerima dampak buruk bagi kehidupan di wilayah pulau tersebut dalam posisi terpengaruh tanpa dapat mempengaruhi berlangsungnya proses berskala global tersebut.

Kecilnya skala usaha di pulau kecil berakibat pada sulitnya keluar dari kondisi kemiskinan dan ketertinggalan. Dengan skala usaha yang kecil, sulit untuk dapat dicapai tingkat pendapatan yang lebih tinggi daripada kebutuhan subsisten sehingga persoalan menjadi semakin sulit untuk diatasi. Pada musim-musim tertentu, konsumsi tetap berlangsung dan lebih tinggi dari yang dapat diproduksi. Disekonomi skala karena ukuran kecil, jumlah penduduk dan luas wilayah yang tersebar saling berjauhan satu gugus dengan gugus lainnya mengakibatkan tingkat kehidupan yang layak menjadi terbatas. Lemahnya daya beli dan struktur produksi yang cenderung homogen tidak memberikan ruang yang cukup bagi kegiatan sirkulasi dan pertukaran dalam suatu siklus produksi secara sistematis.

Keterisolasian wilayah pulau-pulau kecil membawa konsekuensi pada tingkat interaksi dengan wilayah lain yang juga sangat rendah (Hayes, *et al*, 1998). Jauhnya jarak antarpulau-pulau kecil dengan pusat-pusat kegiatan ekonomi yang cukup besar juga menambah permasalahan pengembangan wilayahnya. Keterbatasan intensitas interaksi yang tercermin dari frekuensi transportasi salah satu contoh

yang banyak ditemukan. Demikian juga dengan komoditas yang dari sifat maupun volumenya belum mampu membangkitkan adanya interaksi yang lebih intensif dengan pusat-pusat ekonomi lainnya. Komoditas yang demikian tersedia dalam volume yang tidak cukup besar cenderung saling berkompetisi dengan produk-produk sejenis di wilayah-wilayah pulau-pulau kecil sekitarnya sehingga interaksi dalam bentuk pertukaran produksi antarwilayah tidak pernah terwujud. Ketika terjadi kompetisi antarwilayah maka wilayah dengan jarak terjauh dari pusat ekonomi utama dan dengan skala usaha yang terkecil akan cenderung terkalahkan secara alamiah. Pasokan komoditas dicukupi oleh wilayah sekitar yang terdekat sehingga tidak perlu mendatangkan dari wilayah pulau kecil yang letaknya lebih jauh.

Kondisi wilayah kepulauan dengan keterbatasan-keterbatasan alamiah membawa konsekuensi yang besar pada perilaku migrasi penduduknya (PSPPR UGM, 2003). Pada lingkup internasional migrasi keluar dari pulau-pulau kecil cenderung dominan (Briguglio, 2001; Lockhart 1993; King, 1999). Perkembangan jumlah dan kelompok penduduk cenderung lambat dengan struktur yang memberat pada kelompok usia nonproduktif terutama kelompok laki-laki. Konsekuensi dari tingginya angka migrasi keluar adalah struktur penduduk menurut umur yang didominasi proporsi kelompok umur nonproduktif (umur muda dan tua) dan defisit kelompok usia produktif.

Konsekuensi lain dari lokasi yang terpencil dan ukuran wilayah daratan yang kecil adalah terbatasnya kemungkinan melakukan diversifikasi ekonomi (PSPPR UGM, 2002). Produksi yang cenderung homogen dan antarwilayah dalam kesatuan

kepulauan tidak terdapat keragaman struktur produksi yang memadai, sehingga cenderung memperkecil peluang terjadinya pertukaran antarwilayah yang sekaligus membatasi peluang perkembangan ekonomi yang berbasis pada kekuatan sendiri. Interaksi dengan wilayah lain cenderung kurang kompetitif sebagai akibat inefisiensi dalam proses produksinya. Inefisiensi dalam proses produksi di wilayah yang terpencil terutama muncul dari tingginya biaya transportasi bahan baku maupun pemasaran produksi. Untuk budidaya komoditas-komoditas yang tidak tahan lama kondisi semacam ini jelas sangat tidak menguntungkan bagi produsen di wilayah-wilayah pulau kecil.

Kecilnya skala produksi yang dapat dikembangkan di satu sisi dan keinginan untuk mengembangkan ekonomi secara cepat di sisi lainnya bukanlah dua hal yang dapat dipertemukan secara komplementer. Skala produksi yang kecil cenderung menghambat pengembangan ekonomi skala besar yang dibutuhkan wilayah untuk tumbuh dan berkembang secara cepat, tetapi jika pertumbuhan dipaksakan dengan kegiatan-kegiatan ekonomi skala besar di wilayah ini berbagai kendala alamiah dan kelangkaan sumberdaya manusia dapat muncul segera. Keterbatasan ketersediaan air tanah dan risiko kerusakan lingkungan tinggi serta kelangkaan sumber daya manusia yang terampil serta hambatan kultural dalam pengembangan ekonomi masih banyak terdapat di pulau-pulau kecil.

Kelangkaan air tawar di pulau-pulau kecil muncul sebagai akibat dari kecilnya wilayah tangkapan air itu sendiri. Apabila ditambah dengan struktur dan sifat-sifat fisik geologis wilayah kepulauan yang tidak dapat menahan air dalam jangka waktu yang lama. Ukuran wilayah daratan yang kecil menyebabkan daerah aliran sungai

sebagai wilayah tangkapan hujan yang ada hanya berukuran kecil-kecil saja. Air bersih merupakan kendala terpenting dari kegiatan-kegiatan ekonomi skala besar yang membutuhkan adanya aglomerasi penduduk yang besar (PSPPR UGM, 2003a). Apabila jumlah penduduk bertambah dan berkembang menjadi permukiman besar maka kerusakan lingkungan wilayah pulau kecil akan segera terjadi bahkan menuju kerusakan yang tidak mudah terpulihkan sebagai konsekuensi tingginya kerentanan lingkungan wilayah kepulauan terhadap gangguan-gangguan eksternal. Gagasan pertumbuhan ekonomi yang pesat pada wilayah pulau-pulau kecil akan selalu dibayangi dengan risiko kerusakan lingkungan yang sangat tinggi. Ketersediaan air bersih bagi kehidupan pulau-pulau kecil menjadi faktor yang paling menentukan untuk pemilihan jenis dan skala kegiatan pembangunan yang berlanjut.

Sifat alam pulau-pulau kecil terkait musiman membuat pulau kecil sulit berkembang. Pada musim barat, biasanya angin bertipu kencang, ombak sangat tinggi, dan cuaca kurang menguntungkan untuk kegiatan melaut, sehingga praktis pada musim-musim seperti ini kegiatan ekonomi utama tidak dapat berlangsung dengan baik. Masyarakat pada musim-musim tersebut cenderung menganggur karena kemungkinan melakukan upaya diversifikasi usaha masih terbatas. Kondisi iklim berdampak pada kondisi kemiskinan, isolasi fisik dan sosial, ketidakberdayaan dan keterbelakangan.

Kerentanana terhadap bencana pada pulau kecil diakibatkan oleh keterbukaan wilayahnya di laut bebas sehingga mudah terserang oleh proses tektonik maupun

vulkanik dan berbagai bencana turunannya. Kerusakan akibat bencana di pulau-pulau kecil merupakan kehilangan asset yang seringkali tidak terpulihkan.

Penyediaan infrastruktur sebagai kebutuhan pelayanan untuk penduduk menjadi dilematis. Jumlah penduduk yang relatif terbatas tidak cukup mendukung secara efisien beroperasinya infrastruktur tertentu. Jika standar normatif perencanaan infrastruktur yang konvensional diterapkan secara kaku, maka dapat dipastikan pulau-pulau kecil tidak akan mendapatkan alokasi proyek sehingga akan selalu terbelakang dalam penyediaan infrastruktur. Pada sisi lain kebijakan yang masih bersifat sentral memiliki kecenderungan alokasi yang terpusat dan tidak merata sehingga perhatian terhadap pulau kecil menjadi prioritas yang rendah. Perhatian khusus pada pulau kecil tidak serta merta diikuti oleh realokasi sumberdaya pembangunan secara proporsional. Konsentrasi investasi masih saja akan terjadi pada wilayah yang berkembang. Infrastruktur seperti energi, air bersih, harus disubsidi dengan dana yang sangat besar oleh pemerintah daerah, karena dunia usaha yang menyediakan tentu tidak akan mampu beroperasi dengan efisien dengankecilnya jumlah penduduk (konsumen) berserta daya belinya. Moda pelayanan yang paling tepat adalah dengan moda pelayanan keliling mengikuti konfigurasi fisik wilayah yang tercerai berai.

Kamaruddin *et al.* (2020) dalam kajiannya tentang konsep pembangunan berkelanjutan desa pesisir hijau dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Sumbawa dapat dijalankan dengan beberapa upaya pembangunan hijau diantaranya: Perencanaan dan rancangan hijau, penyediaan ruang terbuka hijau, pengelolaan sampah hijau, pengadaan energi dan komunitas hijau. Manajemen air dan energi,

pengurangan limbah, pengadaan sistem transportasi terpadu, kesehatan lingkungan, dan sinergi antara lingkungan alami dengan buatan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan, sosial, dan ekonomi masyarakat.

B.2.c. Pusat Pertumbuhan Pulau-pulau Kecil

Konsep pusat pertumbuhan diawali dari pemikiran Francois Perroux pada tahun 1955 yang melihat adanya kutub pertumbuhan sebagai penggerak dalam sektor ekonomi suatu wilayah. Perroux menyatakan bahwa pertumbuhan tidak terjadi di sembarang tempat dan tidak terjadi secara serentak, tetapi pertumbuhan tersebut terjadi pada titik-titik yang selanjutnya berperan sebagai kutub pertumbuhan. Kutub-kutub pertumbuhan ini memiliki intensitas yang berubah-ubah dengan pertumbuhan menyebar sepanjang suatu saluran yang beragam dengan dampak yang juga beraneka ragam terhadap aktivitas perekonomian wilayah tersebut (Glasson, 1990).

Disamping itu Perroux (1950 dalam Hadi, 2005) mengemukakan bahwa pusat pertumbuhan direfleksikan dalam kegiatan industri yang memiliki jaringan ke hilir dan hulu. Perkembangan suatu wilayah dan perkembangan ekonomi sebagai perkembangan yang bersifat komprehensif yang meliputi berbagai aspek dalam terjadinya perubahan struktur kota baik secara ekonomi, sosial maupun sistem institusi. Dengan mengeplot pusat pertumbuhan di beberapa daerah, lalu menstimulirnya dengan aktivitas ekonomi (biasanya industri) nilai tambah dan aktivitas itu diharapkan mengalir ke daerah belakang. Dari pemikiran awal mengenai kutub pertumbuhan dapat diketahui bahwa kutub pertumbuhan

merupakan suatu penggerak dalam sektor ekonomi yang mampu mempengaruhi pertumbuhan aktivitas yang ada baik secara ekonomi, sosial maupun sistem institusinya.

Dalam praktiknya strategi pusat pertumbuhan tidak berjalan dengan baik. Menurut Hadi (2005), ada tiga gejala yang mempengaruhi yaitu gejala pertama minimnya kontribusi sektor industri terhadap pendapatan buruh, bahwa pada kenyataannya pembangunan di sektor industri justru disubsidi oleh buruh dan bukan sebaliknya, di samping itu tidak terjadi *forward linkage* dan *backward linkage* pada hulu dan hilir. Gejala kedua terancamnya kelestarian daya dukung lingkungan yang terjadi di pusat-pusat pertumbuhan industri karena akumulasi dampak yang tidak terkontrol. Pencemaran lingkungan, penurunan permukaan air tanah, keringnya mata air adalah beberapa dampak yang ditimbulkan. Gejala ketiga adalah menyusutnya lahan pertanian untuk industri. Alih fungsi lahan terjadi pada pinggiran kota-kota besar yang notabene dipatok sebagai pusat pertumbuhan industri. Berdasarkan ketiga gejala yang terjadi, terungkap bahwa implementasi teori pusat pertumbuhan tidak menciptakan terjadinya *trickle down effect* karena industri yang berjalan tidak berbasis pada ekonomi lokal.

Strategi pengembangan pusat pelayanan merupakan salah satu strategi pendekatan ruang terpadu, dimana pusat pelayanan adalah kota yang mengemban peran sebagai pusat pelayanan bagi wilayah belakangnya. Teori pusat pelayanan sebenarnya didasarkan pada konsep *central place* yang dikemukakan oleh Christaller, yang mengemukakan bahwa *central place* adalah permukiman-

permukiman atau tempat pusat yang melayani penduduk dari wilayahnya sendiri dan juga wilayah belakangnya (Rondinelli, 1985)

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi pada suatu wilayah maka pusat-pusat (*central place*) yang juga melayani penduduk disekitarnya menurut Berry dalam Rondinelli (1985) akan membentuk suatu sistem jaringan penduduk yang besar dan lokasi yang tepat, selanjutnya pusat-pusat tersebut harus dapat dikembangkan sebagai suatu tempat koleksi dan distribusi bagi wilayah lainnya.

Untuk mendukung terselenggaranya kegiatan di pusat-pusat pelayanan tersebut terdapat tiga unsur penting (Daldjoeni, 1997), yaitu: (1) hierarki, yaitu tingkatan pelayanan dimulai dari pelayanan tingkat rendah yang terdapat di pusat-pusat kecil sampai pada pelayanan tingkat tinggi yang terdapat di pusat-pusat besar. Dengan demikian kota besar memiliki hampir semua macam kegiatan pelayanan, sedangkan kota kecil memiliki jenis dan jumlah pelayanan yang terbatas; (2) penduduk ambang, yaitu jumlah penduduk minimum yang dapat mendukung aktivitas pelayanan. Sehingga jenis fasilitas tertentu membutuhkan penduduk ambang (*threshold population*) yang berbeda dengan fasilitas lainnya; (3) lingkup pasar, yaitu jarak pasar maksimum yang harus ditempuh oleh penduduk menuju suatu pusat pelayanan, jika di luar jarak pelayanan tersebut maka penduduk akan mencari pusat pelayanan lain. Lingkup pasar juga dapat dikatakan sebagai batas pengaruh suatu pusat pelayanan terhadap wilayah sekitarnya.

Dalam upaya pengembangan wilayah secara merata, Rondinelli (1985) berpendapat bahwa strategi harus diarahkan untuk mengintegrasikan seluruh sistem ekonomi, dengan memberikan akses seluas-luasnya bagi pertumbuhan

perekonomian wilayah. Tujuannya agar secara langsung dapat meningkatkan produktifitas, memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan sebagian besar penduduk wilayah belakang. Dengan demikian pernyataan ini bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan sekaligus pemerataan. Investasi yang cenderung dipusatkan di kota utama harus didesentralisasikan pada wilayah-wilayah lainnya. Investasi tersebut disentralisasikan pada wilayah-wilayah yang mampu berfungsi sebagai pusat-pusat fasilitas pelayanan, pemasaran, distribusi dan transportasi bagi penduduk sekitarnya. Ini dimaksudkan agar wilayah pinggiran memiliki akses seluas-luasnya bagi usaha pengembangannya. Dengan demikian wilayah perkotaan dan wilayah pinggiran harus dilihat sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi.

Dalam kerangka tata ruang regional, permukiman ditempatkan dalam suatu sistem yang secara fungsional saling berkaitan dan terintegrasi. Sistem tersebut pada prinsipnya merupakan sistem pusat-pusat pelayanan, yang disusun secara hirarkis berdasarkan karakteristik fungsi dan peranan permukiman. Fungsi dan peran permukiman ditentukan berdasarkan kegiatan pelayanan dan lingkup pelayanannya.

Berbagai teori dan persepsi para ahli tentang pusat pertumbuhan dapat dikatakan bahwa keberadaan pusat pertumbuhan adalah untuk dapat mempercepat perkembangan daerah sekitar. Pusat pertumbuhan didukung dengan ada aktivitas yang mampu menarik bagi aktivitas lainnya untuk menghidupkan kawasan tersebut. Pusat pertumbuhan juga harus dilengkapi berbagai infrastruktur perkotaan sebagai syarat bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat kota. Kecenderungan pusat

pertumbuhan baru terdapat pada daerah pinggiran untuk mendukung pusat kota, pemerataan pengembangan dan pembangunan.

Sistem pusat yang terbentuk dalam konsep pusat-pusat pertumbuhan akan mempengaruhi penyediaan fasilitas perkotaan yang merupakan konsekuensi dari fungsi dan peran yang disandang oleh setiap pusat pertumbuhan. Dalam penerapannya, fungsi dan peranan masing-masing pusat pertumbuhan harus disesuaikan dengan karakteristik daerah yang bersangkutan, daerah belakang dan daerah pengaruhnya.

Pusat-pusat pertumbuhan harus dapat berperan dalam kegiatan (Friedmann, 1966): (1) mengoordinasi kemajuan daerah dalam suatu sistem dengan memperhatikan daerah-daerah pendukung pasaran dan pelayanan administratif; (2) untuk memudahkan koordinasi tersebut, ada jenjang pusat yang akan menentukan posisi pusat pertumbuhan, (3) pusat pertumbuhan harus membawa pengaruh pembaharuan terhadap daerah-daerah pengaruhnya.

Disamping itu pusat-pusat pertumbuhan juga dapat berperan (Misra dalam Kuklinski, 1972) sebagai: (1) pusat industrialisasi daerah-daerah yang dilayani yang harus memiliki fasilitas-fasilitas untuk kegiatan industri, pengolahan hasil pertanian dan fasilitas umum. Yang pada akhirnya sebuah pusat pertumbuhan akan tumbuh menjadi pusat perkotaan baru; (2) alat penahan goncangan (*shock absorbers*) dalam proses migrasi yaitu menampung penduduk dari luar wilayah pelayanan pusat pertumbuhan yang bermigrasi ke wilayah pusat pertumbuhan dan menyediakan lapangan pekerjaan bagi mereka yang tidak terserap di titik-titik pertumbuhan.; (3) sebagai penarik tandingan (*counter magnet*) terhadap pusat-

pusat aktivitas kota yang lebih besar; (4) membantu distribusi barang (barang jadi dan setengah jadi) yang diproduksi oleh titik-titik pertumbuhan.

Sebagai kumpulan dari pulau-pulau kecil yang menyebar, memiliki hubungan antarwilayah sebagai wujud keterkaitan antarpulau kecil. Keterkaitan antarwilayah menurut Bendavid-Val (1991) memiliki beberapa kategori antara lain transportasi, komunikasi, *natural resources*, ekonomi, sosial, pelayanan umum dan institusi. Sementara Rondinelli (1985) sebelumnya telah menyatakan bahwa dalam pembangunan spasial, jenis-jenis keterkaitan meliputi tipe keterkaitan fisik, keterkaitan ekonomi, keterkaitan pergerakan penduduk, keterkaitan teknologi, keterkaitan antarwilayah, keterkaitan delivery pelayanan, keterkaitan politik, administrasi dan organisasi. Keterkaitan fisik yang dimaksudkan adalah interaksi pelayanan dari suatu pusat pertumbuhan dengan wilayah sekitarnya berupa jaringan prasarana seperti jaringan jalan, hubungan transportasi, dan lain-lain yang dapat mempengaruhi interaksi keruangan. Keterkaitan ekonomi antarwilayah pada dasarnya memiliki pengertian yang menggambarkan bagaimana hubungan antara perekonomian dari suatu wilayah dengan potensi-potensi yang dimiliki dengan lingkungan di sekitarnya.

Implikasi keterkaitan antarwilayah pulau-pulau kecil tidak bisa lepas dari pola hubungan yang bersifat hierarkis sekaligus komplementer. Hubungan yang bersifat hierarkis merupakan gambaran dari jenjang fungsi dan peran dari wilayah pusat pertumbuhan pulau kecil dengan pulau kecil lain di wilayah sekitarnya akibat adanya perbedaan dalam jumlah, jenis, dan kualitas dari fasilitas yang tersedia di masing-masing pulau kecil dimaksud. Sistem hierarki antara pusat pertumbuhan

dengan wilayah layanan di sekitarnya menurut Neal (2011) dapat dilihat dari pergerakan manusia, barang, uang dan informasi. Dengan demikian keterkaitan antarwilayah pusat pertumbuhan dengan wilayah sekitarnya ditentukan oleh skala ekonomi dan jumlah penduduknya serta intensitas hubungannya.

Berdasarkan peran pusat pertumbuhan dimaksud, Hadi (2005) menyatakan bahwa pembangunan daerah harus didasarkan pada prinsip *bio-region* (ciri-ciri ekologis). Konsep *bio-region* mendasarkan pada pemikiran bahwa lingkungan tidak bisa dikelola berdasarkan pada prinsip administratif apalagi sektoral. Bio-region adalah pembagian daerah berdasarkan keterkaitan ekologis dan bukan politik administratif. Untuk maksud tersebut, pembangunan berkelanjutan regeneratif perlu dilakukan (Hadi, 2024).

B.3. Perspektif Pendekatan Pembangunan Pulau-pulau Kecil

Bagian ini mengulas tentang kajian-kajian terkait pendekatan pembangunan wilayah pulau-pulau kecil yang secara umum terbagi menjadi tiga kelompok yaitu *frontier economy* yang merupakan perspektif pembangunan dengan lebih mengedepankan optimalisasi potensi pulau kecil dalam rangka menciptakan nilai tambah bagi sektor perekonomian, *Deep ecology* dengan pandangan yang lebih bersifat konservatif atau mengedepankan perlindungan terhadap aspek ekologi wilayah pulau kecil, dan *resources balance* dengan pertimbangan terhadap isu pembangunan berkelanjutan yang mencoba memandang kedua perspektif sebagai bagian yang dipertimbangkan dengan porsi yang seimbang dalam perencanaan pembangunan.

B.3.a. *Frontier Economy*

Pendapat mengenai perspektif pembangunan ini melihat bahwa melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi maka kemajuan pulau-pulau kecil akan dapat mensejahterakan masyarakat yang ada. Upaya pemanfaatan sumberdaya secara intensif adalah cara yang dapat dilakukan untuk memenuhi tingkat pertumbuhan ekonomi yang diharapkan. Pertumbuhan ekonomi menekankan pada kuantitatif produksi sehingga meniadakan perhatian pada lingkungan. Konsekuensi dari pendapat pertama ini adalah tidak terkontrolnya pola pemanfaatan sumberdaya alam sehingga pada suatu waktu akan habis atau menipis (Dahuri, 2000). Perspektif ekonomi (Atkinson, *et al.*, 1997) menekankan pada upaya pembangunan pulau kecil melalui pertumbuhan ekonomi (*frontier economic*). Kebijakan fiskal dalam pandangan ini memiliki posisi sebagai salah satu instrumen yang dimiliki pemerintah dalam menciptakan aktivitas-aktivitas perekonomian dan pemanfaatan sumberdaya sehingga akan mendorong pembangunan wilayah pulau-pulau kecil. Keberadaan sumber daya alam berupa keanekaragaman hayati serta biodiversitas yang tinggi menjadi potensi dan peluang untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi pulau-pulau kecil. Kelompok pertama ini diantaranya adalah perspektif pembangunan pulau kecil melalui pertumbuhan pariwisata seperti Archer (1982), Lundberg, *et al.* (1995) dan Vanhove (2005), Balaguer dan Cantavella-Jorda (2002), Baaijens dan Nijkamp (2001) dan Baaijens *et al.* (1998), aliran kota cerdas seperti Grydehoj, A dan Kelman (2016), aliran kota baru reklamasi seperti Gan Hong (2017), keterkaitan pariwisata (Lowe, *et al.*, 2019), investasi pariwisata (Currie, 2018), Dampak investasi asing langsung dalam pariwisata terhadap

pertumbuhan ekonomi (Kumar & Stauvermann, 2023), kontribusi pajak pariwisata terhadap pendapatan (Adedoyin et al., 2023) dan pembangunan pulau kecil melalui bantuan subsidi pemerintah pusat oleh Murinde dan Rarawa (1996) dan Gani (1998) serta Gounder (2001), bantuan pengembangan infrastruktur kebutuhan dasar oleh Branchoux, Fang, & Tateno (2018), Hardin-Ramanan, Chang & Issa (2018), Papapostolou, Kondili, Zafirakis, & Tzanes (2020), Puriningsih (2018) dan Syahputra et al. (2024), pembangunan pertanian dan peternakan serta perikanan (Ririhena, 2007, Sutedi, et al, 2017).

Pandangan *frontier economy* dilandasi oleh arti penting pulau kecil dalam fungsi sebagai sabuk penghubung transportasi, sabuk pengaman sebagai wilayah perbatasan dan sabuk ekonomi. Pengembangan ekonomi pulau kecil sulit dilakukan untuk mencapai skala ekonomis yang optimal dan menguntungkan, karena ukuran pulau yang kecil dan terisolasi, terpisah-pisah dan bertumpu pada kekayaan sumber daya alam serta memiliki ketergantungan terhadap wilayah luar. Keterbatasan akses transportasi menuju pulau kecil menyebabkan perekonomian di pulau-pulau kecil sangat rentan terhadap distorsi dari luar pulau (Carnero Lorenzo, 2016). Hal senada juga disampaikan oleh Dewa Prabawa & Zebua (2024) bahwa konektivitas dan aksesibilitas wilayah kepulauan dan pulau-pulau kecil menjadi hal yang perlu diperhatikan sehingga ketersediaan sarana dan prasarana transportasi merupakan hal mutlak untuk mengatasi permasalahan keterbelakangan wilayah pulau-pulau kecil. Menurutnya, pengelolaan kawasan pulau dan kepulauan juga perlu dilaksanakan dengan pembangunan yang berorientasi ke arah perairan sebagai penghubung untuk menciptakan konektivitas antarpulau.

Terkait dengan dampak pariwisata, Archer (1982), Lundberg *et al* (1995) dan Vanhove (2005) menyajikan beberapa penjelasan dan estimasi *multiplier* pariwisata. Demikian juga Balaguer dan Cantavella-Jorda' (2002) dengan beberapa teknik deret waktu menyelidiki dampak jangka panjang pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara itu sebelumnya Baaijens dan Nijkamp (2001) dan Baaijens *et al.* (1998) mengadopsi pendekatan meta-analitik untuk empiris dampak pariwisata bagi pertumbuhan ekonomi. Studi kasus di negara-negara kepulauan Pasifik (Fiji, Samoa, Kepulauan Solomon, Tonga, dan Vanuatu) menjelaskan bahwa sektor pariwisata memiliki dampak dan kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi, investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment/FDI*) memiliki andil besar terhadap perkembangan negara-negara ini sekaligus sebagai dampak dari pengembangan pariwisata sebagai daya tarik wilayah-wilayah ini (Kumar & Stauvermann, 2023). Studi kasus di Maladewa oleh Adedoyin *et al.* (2023) dijelaskan bahwa pajak dari sektor pariwisata memiliki kontribusi paling besar hingga mencapai 70% dari total pendapatan negara, pajak pariwisata mampu memperbaiki defisit anggaran pada studi kasus yang terjadi di Maladewa.

Pembangunan pulau kecil melalui pariwisata juga menegaskan mengenai keterkaitan pulau kecil yang pada dasarnya tidak dapat terlepas dari daerah lain di sekitarnya sebagai daerah pendukung, saling berkaitan dengan aktivitas lain di luar maupun di dalam pulau, misalnya kegiatan ekowisata yang ada di sebuah pulau kecil erat kaitannya dengan penyediaan akomodasi dan fasilitas pendukung wisata (Lowe, *et al.*, 2019). Pada bagian lain, peningkatan skala ekonomi di pulau-pulau

kecil juga dapat dilakukan dengan mengoptimalkan sektor investasi pariwisata yang harus memperhatikan masyarakat kecil agar ekonominya berkembang. Peranan pemerintah dalam menyeleksi investasi yang masuk berdampak pada perekonomian pulau-pulau kecil (Currie, 2018).

Pembangunan pulau kecil dilakukan dengan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana yang dapat dibiayai dari dana publik (anggaran dari pemerintah). Sarana dan prasarana yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari masyarakat pulau kecil seperti infrastruktur sosial, fasilitas listrik, sumber daya air dan sanitasi, serta jaringan transportasi (Branchoux, Fang, & Tateno, 2018), menggunakan energi yang terbarukan dengan diimbangi *green IT* (Hardin-Ramanan, Chang, & Issa, 2018) yang dapat meminimalisir biaya produksi listrik sehingga dapat mengurangi tarif listrik konsumen (Shea & Ramgolam, 2019), sumber daya air baik (Papapostolou, Kondili, Zafirakis, & Tzanes, 2020), akses transportasi ke pulau-pulau kecil dapat menggunakan kapal pelayaran rakyat yang dapat meningkatkan permintaan layanan transportasi (Puriningsih, 2018).

Pendekatan lain dalam pembangunan pulau kecil dengan kasus di Siprus, adalah melalui pemenuhan kebutuhan bahan pokok di pulau-pulau kecil berasal dari luar pulau melalui proses ekspor-impor (Balcilar, Kutun, & Yaya, 2017). Pengembangan ekonomi pulau kecil dengan kasus Siprus bertumpu pada pertumbuhan yang pesat dari teknologi informasi, merangsang pertumbuhan ekonomi melalui jaringan telekomunikasi dan memperkuat kekuatan independen dalam sektor sosial, ekonomi, transformasi teknologi dan budaya (Cavusoglu, 2016).

Seiring dengan meningkatnya informasi dan teknologi maka saat ini kecenderungan pemerintah daerah lebih mempertimbangkan pandangan yang kedua, dimana potensi alam tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi kawasan sedangkan pandangan pertama dinilai gagal dalam memberikan manfaat ekonomi langsung kepada masyarakat. Walaupun demikian ternyata dampak pembangunan ekonomi dengan pemanfaatan sumber daya alam di suatu daerah ternyata juga kurang memberikan dampak ekonomi yang nyata kepada masyarakat yang hidup di sekitar kawasan eksploitasi. Bahkan dampak eksploitasi tersebut telah merusak tata nilai adat tradisional masyarakat tentang pemanfaatan sumber daya alam karena sesungguhnya SDA tersebut selain memiliki fungsi ekonomi subsistem juga memiliki fungsi sosial dari komunitas/masyarakat tersebut.

B.3.b. *Deep Ecology*

Adapun perspektif ekologi (Adrianto dan Matsuda, 2004) menekankan pada kelestarian lingkungan melalui konservasi (*deep ecology*), pulau-pulau kecil harus dilindungi karena memiliki fungsi ekologis penting. Pendapat yang kedua melihat bahwa aspek ekologi sebagai prioritas (*model deep ecology*), sehingga dampak negatif akibat pengaruh manusia harus diminimalkan atau ditiadakan. Sebagai dampak dari kerusakan lingkungan, dianjurkan untuk pertumbuhan ekonomi nol. Kelompok ini di antaranya adalah aliran ekologi politik seperti Maguidad (2015) dan Keraf (2002), perubahan iklim seperti Ghina (2003), Bohle, *et al* (1994) dan Johnson (2016), permasalahan iklim menjadi isu prioritas pembangunan di banyak negara (Robinson *et al.*, 2022), dampak iklim terhadap kerentanan sosial-ekonomi masyarakat (Islam *et al.*, 2023) dan (Pathak *et al.*, 2021), aliran integritas prioritas

ekologi oleh Riyanta (2005) dan aliran partisipasi publik seperti Farhan dan Lim (2014), pengembangan kawasan konservasi laut (Nirwansyah dan Adhi, 2014), implementasi *Integrated Island Management* (IIM) di Pulau Smith, Andaman Utara, India (Sridhar *et al.*, 2020), dan penerapan konsep ICZM pada pulau-pulau kecil di Kepulauan Mikronesia, Azores dan Madeira di Portugal serta Kepulauan Kanari di Spanyol (Calado *et al.*, 2007).

Menurut Ghina (2003), masalah lingkungan yang dihadapi pulau kecil adalah: perubahan iklim dan kenaikan permukaan laut, ancaman terhadap keanekaragaman hayati, ancaman terhadap sumber daya air tawar, degradasi lingkungan pesisir, polusi, energi, dan pariwisata. Perubahan iklim dan dampak terkaitnya menjadi ancaman terbesar bagi lingkungan pulau kecil. Di samping itu, pengembangan pulau dan kesadaran akan keberlanjutan dicirikan dan dipraktikkan sangat tergantung pada ketersediaan keuangan dan pariwisata (Johnson, 2016). Karakteristik lainnya adalah hubungan kota antara spasialitas pulau kota dan pembentukan kota, konfigurasi darat-laut, dan sifat ruang publik antara darat dan laut (Gang Hong, 2017).

Saat ini perubahan iklim telah menjadi isu yang mendunia, hal ini berkaitan dengan meningkatnya bencana alam di berbagai belahan dunia, terutama pada negara-negara yang terletak di daerah khatulistiwa. Bencana banjir saat terjadi musim penghujan dan kekeringan saat musim kemarau adalah merupakan salah satu efek dari perubahan iklim tersebut. Berkaitan dengan perubahan iklim tersebut, sesungguhnya SIDS hanya memberikan 1% emisi gas buangan ke atmosfer tetapi menerima dampak dari perubahan iklim yang paling besar dibandingkan dengan

negara-negara maju/industri. Pemanasan global dan perubahan iklim mengancam keberadaan pulau-pulau kecil tersebut terkait dengan peningkatan muka air laut sehingga dapat membahayakan infrastruktur vital yang ada di pulau-pulau kecil tersebut. Perubahan iklim juga dapat membawa kerusakan pada terumbu karang, erosi karang dan terganggunya aktivitas pertanian, menurunnya daya tahan tanah dan ekosistem laut serta meningkatnya daya tahan penyakit tertentu baik pada manusia ataupun pada tanaman. Laporan terakhir dari *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) menyatakan bahwa kerusakan kondisi pesisir akibat dari erosi pantai dan pemutihan terumbu karang akan menyebabkan rusaknya sumber daya perikanan dan menurunkan nilai dari wisata. Peningkatan muka air laut dapat menyebabkan banjir, badai, erosi dan ancaman dari pantai yang kemudian mengancam infrastruktur vital, perumahan dan fasilitas pendukung kehidupan dari penduduknya. Perubahan iklim dapat menurunkan sumber daya air akibat dari rendahnya waktu hujan dan panjangnya musim kemarau. Peningkatan temperatur juga meningkatkan serangan spesies tertentu yang dapat mengancam spesies lainnya (Bohle, Downing and Watts, 1994). Berdasarkan kajian (Robinson *et al.*, 2022) dijelaskan bahwa permasalahan iklim dan kerentanan-kerentanan terkait iklim menjadi isu pembangunan prioritas bagi banyak negara dan sering diasosiasikan dengan masalah lain seperti kemiskinan. Dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa beberapa negara mulai mempersiapkan untuk merevisi kebijakan perencanaan mereka untuk lebih dikaitkan dengan adaptasi terhadap perubahan iklim berdasarkan *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC).

Sementara itu, hasil penelitian lainnya yang mengkaitkan antara perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan (Hay *et al*, 2003, Hug dan Reid, 2004, Munasinghe, 2003, Koshy *et al*, 2005) dalam Briguglio *et al*, (2007), khususnya di negara-negara pulau kecil menunjukkan bahwa iklim merupakan “aset utama” yang mempengaruhi aktivitas pariwisata, perikanan dan kegiatan lainnya di wilayah pesisir secara alamiah. Sebab di negara-negara itu aktivitas ekonominya bergantung pada pariwisata, perikanan dan kegiatan lain di pesisir. Penelitian Briguglio dan Cordina (2003) di Malta menunjukkan bahwa perubahan iklim telah mempengaruhi aktivitas pariwisata, perikanan tangkap dan utilitas publik. Artinya perubahan iklim di negara-negara pulau maupun atol tidak hanya berdampak secara ekologis, klimatologis maupun ekosistem, melainkan juga sosial maupun ekonomi. Akibatnya, kehidupan manusia yang bermukim di negara-negara itu terancam.

Perubahan iklim akibat pemanasan global berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Islam *et al*. (2023) berdampak terhadap terjadinya krisis kesehatan, ancaman pada ketersediaan pangan, ketidakseimbangan alam dan ekosistem, dan bencana alam yang umumnya memang terjadi secara global yang pada akhirnya berpengaruh terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat terutama pada kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Pada sektor pariwisata, bencana alam akibat perubahan iklim juga akan meningkatkan kerentanan kerusakan infrastruktur pariwisata yang konsekuensinya akan menyebabkan kerugian bagi pendapatan masyarakat dan hilangnya lapangan pekerjaan yang secara tidak langsung juga akan berdampak terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat (Pathak *et al.*, 2021).

Wilayah pulau kecil memiliki keberlanjutan dalam perspektif sosial dan ekonomi, namun tidak dari perspektif lingkungan, justru mengalami kerusakan. Dinamika perubahan akibat pembangunan yang terjadi, ambiguitas dan ketidakberdayaan penegakan hukum telah menyebabkan kerusakan lingkungan sampai batas tertentu pada pulau kecil. Karena itu, diperlukan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta partisipasi publik, untuk melakukan upaya pemantauan, mengevaluasi, dan (jika mungkin) membangun kembali lingkungan wilayah pulau kecil yang rusak tersebut (Farhan and Lim, 2014).

Salah satu pendekatan dalam mengatasi kerusakan lingkungan pulau-pulau kecil adalah pendekatan ekologi politik untuk adaptasi perubahan iklim. Ekologi politik yang dimaksudkan adalah berupa proses perencanaan pulau-pulau kecil yang mengharuskan perlu adanya hubungan yang baik di antara para pemangku kepentingan. Realisasi hubungan baik ini harus diintegrasikan ke dalam politik proses pengambilan keputusan yang melibatkan para pemangku kepentingan. Pendekatan ekologi politik dapat digunakan sebagai instrumen untuk mempelajari dinamika iklim mengubah adaptasi dan urbanisasi pariwisata di pulau-pulau kecil (Maguigad, *et al*, 2015). Sovacool (2021) menjelaskan bahwa tidak hanya sekadar untuk mengetahui hubungan kekuasaan atau kerentanan, ekologi politik secara lebih luas menggambarkan proses pembangunan berkelanjutan atau mitigasi perubahan iklim.

Terkait pendekatan ekologi politik ini, menurut Keraf (2002), manusia dibentuk oleh dan merealisasikan dirinya dalam alam. Bagi biosentrisme dan ekosentrisme, komunitas biotis atau komunitas ekologis mempunyai peran penting,

bahkan lebih penting dari komunitas sosial. Biosentrisme dan ekosentrisme memperluas pemahaman etika, yang menganggap komunitas biotis atau komunitas ekologis sebagai komunitas moral. Etika tidak lagi dibatasi hanya bagi manusia. Etika biosentrisme dan ekosentrisme berlaku bagi semua makhluk hidup.

Pembangunan dan pengelolaan pulau kecil juga mulai memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan (Deboudt, Dauvin, & Lozachmeur, 2008) dalam konteks ekologi politik ini yang dibuktikan dengan semakin banyak pihak yang ikut serta dalam pelaksanaan dan penerapan konsep *Integrated Coastal Zone Management* (ICZM) sebagai bagian dari upaya pengelolaan pulau kecil. Fokus ICZM sendiri bukan hanya berhenti pada konservasi sumber daya alam saja tetapi juga meliputi upaya mitigasi dampak perubahan iklim. Menurut Griffith dan Ashe (1993), konsep perencanaan pulau kecil secara terpadu (ICZM) memiliki peran penting dalam perencanaan pembangunan dalam mengatasi berbagai permasalahan yang ada di wilayah pesisir dan pulau kecil, salah satunya melalui penilaian dan analisis kerentanan wilayah tersebut terhadap berbagai bencana maupun dampak dari kegiatan wisata dan pembangunan lain yang mungkin terjadi. *Integrated Island Management* (IIM) yang diterapkan di Pulau Smith, Andaman Utara, India dalam dokumen rencananya memuat tentang analisis kondisi eksisting penggunaan lahan dan tutupan lahan, kawasan ekologi sensitif, daya dukung pembangunan dan persepsi bahaya pada pulau ini. Dalam perencanaanya juga mencakup tentang penentuan kawasan yang dapat dikembangkan dan tidak dapat dikembangkan, kawasan budidaya dan konservasi, serta arahan pengembangan ekowisata (Sridhar *et al.*, 2020).

Konsekuensi pembangunan pulau kecil dalam pendekatan kedua ini adalah harmonisasi dengan alam atau terkontrolnya pemanfaatan sumber daya alam dengan membatasi pemanfaatan ruang secara berlebihan sehingga secara fisik keruangan pembangunan yang ada perubahannya relatif stagnan. Stagnasi pembangunan yang muncul karena masih ada pemanfaatan sumber daya yang belum digunakan secara penuh.

Calado *et al.* (2007) dalam kajiannya terkait penerapan konsep ICZM pada pulau-pulau kecil di Kepulauan Mikronesia, Azores dan Madeira di Portugal serta Kepulauan Kanari di Spanyol berpendapat bahwa perencanaan dengan berbasis ICZM ini dianggap sebagai sebuah langkah awal yang positif, namun hal lain yang perlu diperhatikan terkait tata kelola pemerintahan, partisipasi masyarakat dan kesadarannya terhadap permasalahan-permasalahan yang ada pada kawasan pulau-pulau kecil menjadi hal penting. Menurutnya, pengembangan kawasan pulau-pulau kecil membutuhkan strategi khusus bahwa perencanaannya tidak dapat disamakan dengan wilayah-wilayah pada umumnya. Berdasarkan studi kasus di Kepulauan Mikronesia, perencanaan tata ruang menjadi instrumen yang mampu mengendalikan pengelolaan dan penggunaan lahan secara lebih jelas, tidak hanya sampai di sini bahwa masyarakat juga harus teredukasi terhadap hal ini. Pandangan terkait hal ini juga diungkapkan oleh Nowak *et al.* (2023) dalam kajiannya bahwa perencanaan penataan ruang tidak cukup dalam melaksanakan pengelolaan kawasan pulau-pulau kecil terlebih lagi jika dihadapkan dengan permasalahan perubahan iklim, kemudian strategi-strategi adaptasi perlu diintegrasikan di

dalamnya, solusi-solusi yang bersifat sektoral juga harus menjadi pertimbangan bagi penyelesaian masalah iklim ini.

Wilayah pulau kecil mengalami keterbelakangan ekonomi karena kondisi wilayah yang tidak memungkinkan bekerjanya elemen-elemen sosial, politik dan demografi serta keruangan secara sinergis dalam pembangunan. Setiap elemen wilayah bahkan cenderung bekerja saling negasi terhadap elemen lainnya, sehingga dalam upaya pengembangan wilayah pulau-pulau kecil banyak sekali dilema dan paradoks yang tidak mudah dicari komprominya. Faktor fisik wilayah merupakan kendala terbesar yang menurunkan berbagai masalah pembangunan di wilayah pulau kecil. Pembangunan wilayah pulau-pulau kecil hendaknya menempatkan keberlanjutan kehidupan wilayah dan integritas ekologis sebagai tujuan penting. Orientasi pertumbuhan ekonomi dalam pembangunan tampaknya harus ditempatkan pada prioritas yang rendah (Rijanta, 2005).

Pertumbuhan ekonomi yang nol tentunya tidak akan menciptakan pendapatan dan menjadi kendala untuk mengentaskan kemiskinan bahkan cenderung menjadikan persoalan ketidakmerataan dan kerusakan lingkungan semakin membesar. Untuk itu maka pertumbuhan ekonomi tetap diperlukan tetapi dengan menggunakan strategi yang memuat aspek lingkungan di dalamnya yaitu disebut sebagai pembangunan berkelanjutan (Hadi, 2005). Konsep ini berorientasi jangka panjang dan menunjuk pada eksistensi dan solidaritas antargenerasi.

B.3.c. *Resources Balance*

Berdasarkan pada dua posisi pandangan di atas, terdapat kombinasi yang berupaya mempertimbangkan kedua pendapat antara dua arus ekonomi dan

lingkungan sebagai bentuk bagi akomodasi pembangunan yang berkelanjutan (*model resource balance*). Di antara dua pendapat antara orientasi ekonomi dan prioritas lingkungan tersebut salah satunya adalah konsep yang dikenal sebagai agromarine, yaitu pendekatan pembangunan pulau-pulau kecil yang kegiatan utamanya bertumpu pada kegiatan pendayagunaan sumber daya laut (penangkapan ikan, budidaya laut, industri pengolahan laut) yang dikombinasikan dengan kegiatan pertambakan dan pertanian dalam arti luas. Pada perkembangannya konsep ini diperluas dengan memasukkan kombinasi dari pendayagunaan jasa-jasa lingkungan kelautan (pariwisata bahari). Adapun dasar yang menyangga konsep ini adalah 1) kesesuaian dan daya dukung lingkungan, 2) pendekatan agribisnis, 3) pendekatan kemitraan. Ketiganya harus diterapkan sebab akan menciptakan keberlanjutan pada dua sisi, yaitu ekologis dan ekonomis (Dahuri, 2000). Pada bagian lain varian dari kombinasi ini juga sebagaimana dinyatakan oleh Karampela *et al* (2017) yaitu pembangunan lokal yang berkelanjutan melalui perubahan sosial ekonomi dan lingkungan pada kasus pulau kecil. Demikian juga dengan pendekatan sistem pertanian berkelanjutan oleh Ririhena (2007).

Menurut Direktorat Pemberdayaan Pulau-pulau Kecil Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Departemen Kelautan dan Perikanan RI (2000), pengembangan pengelolaan pulau-pulau kecil dapat dilakukan melalui tiga pendekatan yaitu pendekatan hak, pendekatan ekosistem dalam alokasi ruang wilayah pulau, dan pendekatan pengelolaan yang sesuai dengan latar belakang setempat. Pendekatan hak menekankan pada pengakuan dan perlindungan hukum atas hak-hak masyarakat adat dan terjalinnya kerjasama usaha yang setara antara

masyarakat dan investor. Pendekatan ekosistem menekankan pada internalisasi nilai-nilai ekologis dan daya dukung lingkungan dalam pengembangan pembangunan pulau-pulau kecil. Sedangkan pendekatan sesuai dengan latar belakang setempat menekankan pada kesesuaian pembangunan dengan aspirasi masyarakat dan daya dukung lingkungan pulau-pulau kecil.

Selain di atas, ada paradigma baru pengelolaan sumber daya alam yang lebih menekankan pada pengakuan nilai-nilai adat tradisional masyarakat. Prinsip keberlanjutan, pengakuan akan hukum adat tradisional dapat dicapai melalui pendekatan pengelolaan berbasis masyarakat (*community-based management*). Artinya, keberlanjutan pemanfaatan sumberdaya alam pulau kecil diupayakan dengan memberi perhatian utama pada aspek keberlanjutan masyarakat yang ada di dalam atau sekitar pulau-pulau kecil sebagai sebuah sistem komunitas. Variabel penting dalam paradigma ini misalnya konsep-konsep *traditional fisheries* yang mampu melakukan *self-control* terhadap pemanfaatan pulau, penggunaan teknologi yang sesuai, tingkat kolektivitas yang tinggi antara anggota komunitas kawasan pulau-pulau kecil dan adanya *traditional knowledge* yang mencerminkan upaya ketahanan sumberdaya alam dalam jangka waktu panjang. Hal ini tentunya sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Deklarasi Barbados tentang pembangunan berkelanjutan di pulau-pulau kecil dimana antara pengetahuan lokal masyarakat dengan ilmu dan teknologi yang berkembang dapat disinergikan dan dikolaborasikan agar tercapai tujuan dari pembangunan berkelanjutan itu sendiri.

Model resources balance approach menegaskan pembangunan berkelanjutan pulau-pulau kecil dengan dimensi sosial ekonomi dan lingkungan dilakukan untuk

memenuhi kebutuhan manusia saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Pemanfaatan pulau-pulau kecil tidak hanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan saat ini saja, tetapi juga menjamin generasi yang akan datang dapat menikmati sumber daya pulau-pulau kecil tersebut. Dalam konteks ini pemanfaatan pulau-pulau kecil perbatasan berkelanjutan adalah suatu upaya pemanfaatan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan yang terdapat di pulau untuk kesejahteraan manusia terutama pemangku kepentingan sedemikian rupa sehingga laju tingkat pemanfaatan tidak melebihi daya dukung pulau kecil tersebut. Fauzel & Tandrayen-Ragoobur (2023) dalam kajiannya menjelaskan variabel pembangunan berkelanjutan (ekonomi: ketenagakerjaan dan kesejahteraan), sosial (inklusi sosial), dan lingkungan (efisiensi penggunaan sumberdaya alam dan energi) memiliki kontribusi bagi peningkatan sektor pariwisata dalam jangka panjang, studi kasus di Mauritius menunjukkan adanya peningkatan PDB akibat dari penerapan pendekatan pembangunan berkelanjutan untuk wilayah pulau atau kepulauan. Dalam kajian ini dijelaskan bahwa semakin baik variabel pembangunan berkelanjutan akan menciptakan daya tarik wisata yang semakin tinggi bagi pembangunan wilayah pulau kecil.

Implementasi konsep *blue cconomy* atau ekonomi biru dalam pengelolaan wilayah pulau-pulau kecil mungkin menjadi strategi yang paling relevan dengan model ini. Bahwa konsep *blue cconomy* merupakan upaya peningkatan ekonomi, kehidupan dan inklusi sosial masyarakat dengan tetap memerhatikan kelestarian lingkungan dan sumber daya kelautan, konsep ini akan menjamin terciptanya

keberlanjutan lingkungan dan efisiensi pengelolaan sumberdaya kelautan (Martínez-Vázquez et al., 2021). Implementasi konsep ini pada negara negara SIDS dan CARICOM (*Caribbean Community*) berdasarkan kajian yang dilakukan oleh (Hassanali, 2020) mampu menciptakan keuntungan secara kolektif dari sisi ekonomi, sosial, dan ekologi di wilayah Kepulauan Karibia. Menurut Darajati (2023), *blue cconomy* dapat menjadi peluang bagi sumber pendapatan wilayah-wilayah pesisir dan kepulauan di Indonesia sebagai salah satu strategi untuk mewujudkan diri menjadi poros maritim dunia. Dalam konteks pengelolaan pulau-pulau kecil dan terluar dengan berbagai keterbatasannya, konsep ini juga memungkinkan untuk diterapkan untuk menciptakan pembangunan yang berbasis *resources balance approach*. *Blue bonds* atau obligasi biru menjadi salah satu opsi pembiayaan fiskal yang dilakukan dalam implementasi *blue cconomy* dalam pengembangan wilayah pulau-pulau kecil, dalam kajian March *et al.* (2023) di Kepulauan Bahama dijelaskan bahwa sektor pariwisata, potensi angin lepas pantai, tenaga pasang surut dan gelombang, serta kawasan konservasi air serta kekayaan alam memiliki potensi yang besar untuk penerapan konsep ini, kemudian sektor perikanan tangkap dan transportasi menjadi juga memiliki potensi yang cukup menjanjikan.

Menurut Hadi (2005), pertumbuhan ekonomi tetap diperlukan tetapi dengan menggunakan strategi yang memuat aspek lingkungan di dalamnya yaitu disebut sebagai pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan pulau-pulau kecil dengan dimensi sosial ekonomi dan lingkungan (*resoures balance*) dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia saat ini tanpa mengurangi kemampuan

generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Perpektif pembangunan berkelanjutan ini di antaranya pembangunan pesisir terpadu oleh Ashe, (1993) dan Abubakar (2006). pemberdayaan masyarakat lokal oleh Karampela (2017), dan agromarina oleh Dahuri (2000). kontribusi pembangunan berkelanjutan terhadap pertumbuhan ekonomi oleh Fauzel & Tandrayen-Ragoobur (2023). implementasi *blue cconomy* oleh Martinez-Vazquez *et al.* (2021), Hasanali (2020), Darajati (2023), dan March *et al.* (2023).

Ukuran pulau kecil yang terbatas berimplikasi pada terciptanya kegagalan pasar berupa ketidakseimbangan penyediaan dengan permintaan. Skala ekonomis yang tidak tercapai diimbangi dengan lokasi yang terpencil menyebabkan dunia usaha tidak berminat masuk. Pada sisi yang lain keberlanjutan sistem aktivitas ekonomi sosial budaya dan lingkungan terdampak. Meningkat hal tersebut maka intervensi pemerintah sebagai pelaku ekonomi ke pulau kecil menjadi sebuah keniscayaan sebagai pionir yang membuka keterisolasian wilayah. Ovaliani *et al.*, (2023) dalam kajiannya di Kepulauan Romang, Kabupaten Maluku Barat Daya menjelaskan bahwa ketidakmampuan wilayah pulau-pulau kecil untuk mencapai skala ekonomi baik dalam hal administrasi, usaha produksi, dan transportasi laut menjadi penyebab terhambatnya pembangunan dan kemiskinan, ketersediaan sarana dan prasarana di wilayah ini menjadi sulit dan memakan biaya yang mahal karena wilayahnya yang kecil dan terisolasi, kualitas sumber daya manusia juga menjadi terbatas.

Myrdal (1975) dalam Sukirno (1982), telah menyadari bahwa apabila pemerintah tidak secara aktif campur tangan sebagai pelaku ekonomi dalam

kegiatan ekonomi, yang berarti bahwa perekonomian tersebut diatur oleh mekanisme pasar, maka tingkat pembangunan yang berbeda di antara berbagai wilayah akan memberikan akibat yang buruk pada pola pembangunan selanjutnya. Semakin lama jurang kesejahteraan dan tingkat pembangunan di antara wilayah tertinggal yang salah satu contohnya adalah pulau-pulau kecil perbatasan dan wilayah yang maju dan berkembang akan menjadi semakin besar. Secara umum diketahui bahwa kegiatan sektor industri, perdagangan, keuangan dan berbagai kegiatan ekonomi lainnya di wilayah yang maju dan berkembang akan menjadi lebih lancar dan lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan di wilayah tertinggal dan terpencil. Dengan demikian pembangunan akan lebih cepat berlangsung dan terkonsentrasi hanya pada wilayah yang telah lebih maju dan berkembang sehingga menambah lebarnya jurang kesejahteraan antarwilayah.

Pemerintah harus berperan sebagai regulator, eksekutor, dan fasilitator, sebagai regulator artinya harus mendorong penataan aturan-aturan yang ada di dalam pengembangan dan pemanfaatan pulau, sebagai eksekutor artinya mampu menciptakan kebijakan yang langsung menyentuh seluruh lapisan masyarakat, dan sebagai fasilitator artinya pemerintah dapat memberikan jaminan iklim pengembangan dan pemanfaatan pulau-pulau kecil secara kondusif melalui penyediaan infrastruktur pulau. Ada tiga fungsi pemerintah dalam melakukan intervensi sebagai pelaku ekonomi bagi pulau-pulau kecil yaitu menciptakan efisiensi ekonomi, pemerataan ekonomi dan stabilitas ekonomi makro (Nakatani, 2019). Intervensi melalui efisiensi ekonomi dilakukan dengan penyediaan barang publik, mengingat dunia usaha tidak ada yang bersedia menyediakannya karena

adanya fenomena *free riders*. Intervensi melalui pemerataan ekonomi ditujukan dengan maksud redistribusi pendapatan melalui kebijakan perpajakan, sedangkan intervensi melalui stabilisasi ekonomi makro dilakukan dengan cara melakukan stabilisasi dan stimulan pertumbuhan ekonomi. Ketiga intervensi ini, bermuara pada kebijakan fiskal. Berdasarkan studi kasus kebijakan desentralisasi fiskal pemerintah Nashrullah, (2023) menyatakan bahwa kebijakan insentif fiskal memberikan dampak positif bagi pembangunan nasional dan dalam konteks kajian ini terhadap pembangunan wilayah pulau-pulau kecil. Kebijakan ini juga memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi (Umassangadji *et al.*, 2022).

Konsep turunan dari *resource balance* adalah kebijakan fiskal atau belanja pemerintah dalam pembangunan pulau kecil. Bantuan subsidi pemerintah pusat sebagai bentuk dari fiskal pengeluaran, merupakan sumber pertumbuhan ekonomi penting untuk beberapa negara kecil pulau. Dampak pengganda fiskal sangat bergantung pada pemerintah pusat menurut Murinde dan Rarawa (1996) dengan kasus Kepulauan Solomon, Gani (1998) beberapa negara pulau kecil di Pasifik dan Gounder (2001) untuk kasus negara Fiji. Subsidi pemerintah pada transportasi kapal feri menurut Syahputra *et al.* (2024) mampu memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan kepulauan terluar. Keberadaan kapal feri sebagai moda transportasi penghubung antarpulau menjadi sangat penting sehingga keberadaannya dapat menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi terutama pada sektor pariwisata dan perdagangan. Subsidi dari pemerintah membantu menjaga keberlanjutan operasionalnya dalam jangka panjang dan mengurangi beban biaya terutama bagi

masyarakat sekitar. Adrian Rihaksa & Susanti (2023) menjelaskan bahwa keberadaan infrastruktur pendukung pariwisata sangat penting. Keberadaannya mampu meningkatkan permintaan, terkait pariwisata internasional di Indonesia, kuantitas dan kualitas akomodasi menjadi faktor yang menentukan seberapa layak sebuah kawasan wisata bagi wisatawan asing.

Berkenaan dengan peran fiskal ini, Nakatani (2019) memberikan kerangka analisis untuk merumuskan aturan fiskal di ekonomi pulau-pulau kecil yang rentan terhadap bencana alam dengan contoh kasus di negara-negara Pasifik, berupa: (a) kalibrasi target utang terhadap PDB jika terjadi guncangan bencana alam, (b) mempelajari dampak guncangan perubahan iklim yang tidak terduga (atau guncangan bencana alam permanen) terhadap keberlanjutan utang, (c) menunjukkan bagaimana target utang dengan guncangan bencana alam probabilistik dapat dihubungkan dengan keseimbangan fiskal, pengeluaran, dan pendapatan, (d) merekomendasikan aturan pengeluaran berulang, yang memiliki beberapa sifat yang diinginkan seperti memungkinkan pengeluaran pemerintah yang diperlukan untuk pemulihan kerusakan yang disebabkan oleh bencana alam, tidak memerlukan perhitungan potensi tingkat pertumbuhan PDB yang sulit diperkirakan untuk pulau-pulau kecil dan bebas dari prasyarat untuk aturan pertumbuhan pengeluaran (posisi fiskal awal dalam kondisi mapan) yang tidak terpenuhi, (e) kerangka kerja khusus bagi eksportir komoditas untuk memperlancar volatilitas konsumsi/tabungan yang timbul dari sumber daya alam.

Alokasi fiskal (anggaran pemerintah) dialokasikan juga untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana di pulau kecil. Sarana dan prasaran yang diperlukan

untuk kehidupan sehari-hari masyarakat pulau kecil seperti infrastruktur sosial, fasilitas listrik air dan sanitasi, serta jaringan transportasi (Branchoux, Fang, & Tatenno, 2018). Dengan tujuan yang sama untuk mengurangi perbedaan kondisi antara daratan utama pulau besar dan pulau-pulau kecil, Jepang memberlakukan undang-undang nasional khusus tentang pembangunan pulau-pulau kecil yang disebut Undang-Undang Promosi dan Pembangunan Kepulauan Terpencil (RIPDA) pada tahun 1953 (UU No 72/1953), direvisi dengan UU No 8/ 1993. Tujuan dasar dari undang-undang ini adalah untuk meningkatkan perekonomian pulau-pulau dengan mengembangkan sarana dan prasarana dasar sehingga tidak terjadi perbedaan kondisi antara daratan dan pulau-pulau (NIJI, 1996). Karena kondisi khusus mereka dibandingkan dengan pulau-pulau lain di Jepang, ada tiga undang-undang nasional khusus yang diberlakukan untuk mempromosikan pulau-pulau kecil tertentu, yaitu *Amami Islands Promotion and Development Act (AIDA)*, yang ditetapkan pada tahun 1954, *the Ogasawara Islands Promotion and Development Act (OIDA)* pada tahun 1969 dan *Okinawa Islands Promotion and Development Act (OPDA)* pada tahun 1972. Rezim pengembangan dan pengelolaan pulau kecil di Jepang mirip dengan yang dipraktikkan di negara berkembang daripada di negara maju. Karena ketergantungan fiskal yang tinggi pada pemerintah pusat dan/atau prefektur, kebijakan semi top-down sering dilakukan oleh pemerintah (Hasegawa, 2000).

B.3.d. Rangkuman Kajian Pembangunan Pulau-pulau Kecil

Beberapa penelitian yang dapat diinventarisasi sebagai yang menjadikan pulau-pulau kecil sebagai objek atau lokus penelitian yang mencerminkan

perspektif teoritis ekonomi (*frontier economic*), ekologis (*deep ecology*) dan bauran keduanya (*resource balance*). Penelitian ini mengungkapkan kebaruan dengan melakukan pengembangan terhadap teori-teori dan penelitian sebelumnya dalam perspektif pembangunan pulau-pulau kecil, dalam penelitian ini kebijakan fiskal sebagai terminologi nasional dianalogikan sebagai terminologi fiskal daerah khususnya sumber-sumber pengeluaran di daerah kabupaten berupa belanja barang dan jasa, belanja pegawai, dan belanja *transfer payment*. Sumber-sumber pengeluaran tersebut dinilai sebagai instrumen dan stimulan dalam pembangunan berdasarkan perspektif *frontier economy* melalui pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan menurut perspektif *deep ecology*. Gap antara kedua perspektif ini kemudian dijadikan sebagai fokus penelitian untuk menilai bagaimana peran belanja daerah/fiskal secara keruangan di wilayah pulau-pulau kecil menjadi solusi untuk menciptakan pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan pulau-pulau kecil. Berdasarkan hal-hal yang dipaparkan tersebut, rangkuman kajian pembangunan pulau-pulau kecil dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2. 1
Penelitian tentang Pembangunan Pulau-pulau Kecil

No.	Nama Peneliti	Tahun	Judul Penelitian	Lokus	Substansi Penelitian
Frontier Economic (Kota cerdas, reklamasi, pariwisata, kebutuhan dasar infrastruktur, pertanian/peternakan/perikanan, bantuan subsidi anggaran/fiskal/ekonomi makro)					
1.	Grydehøj, A., et al.	2015	Returning from the Horizon: Introducing Urban Island Studies', Urban Island Studies, 1(1), 1-19	Aglomerasi perkotaan terpadat di dunia: Tokyo, Guangzhou, Jakarta, Manila, Mumbai, dan Mexico City. • Kota terbesar dan terpadat di Amerika Serikat (New York City) dan sub-Sahara Afrika (Lagos) serta Amerika	Kajian tentang pulau kecil kota telah memberikan kontribusi yang berharga bagi penyatuan tentang kajian perkotaan dan kajian pulau. Kajian tentang pulau kota (kecil) membantu meningkatkan pemahaman tentang pulau, kota, dan semua yang ada di antaranya. Agglomerasi perkotaan terpadat di dunia didirikan di pulau-pulau kecil; Kota terbesar dan terpadat berada di pulau-pulau kecil'

				Selatan (São Paulo - kota pulau dari São Vicente).berada di pulau-pulau kecil • Ibu kota negara dan yurisdiksi pulau subnasional yang secara substansial otonom yang berbasis atau didirikan di pulau-pulau kecil (Amsterdam, Kopenhagen, London, Paris, Stockholm, Douglas - Isle of Man; Mariehamn - Åland; Nikosia, - Siprus; Nuuk - Greenland; Reykjavík, Islandia; Saint Helier - Jersey; St Peter Port - Guernsey; Torshavn - Faroe; dan Valletta - Malta. • Busur negara-negara kepulauan di Asia Timur, Asia Tenggara, dan Pasifik (Jepang, Taiwan, Indonesia, Filipina, Singapura, Indonesia, dan Papua Nugini) memiliki populasi kolektif besar. • Negara berdaulat berpenduduk terpadat di dunia dan yurisdiksi subnasional yang secara substansial otonom seluruhnya atau sebagian besar berada pada pulau-pulau kecil: Makau, Singapura, Hong Kong, Bahrain, Malta, Bermuda, Sint Maarten, Maladewa, Jersey, Guernsey, Saint Martin, Taiwan, Barbados, Mauritius, dan Mayotte. • Pusat perdagangan pulau kecil yang memainkan peran kunci dalam pergerakan produk, orang, dan ide antara Timur dan Barat, Utara dan Selatan: Bruges, Gotland, Lamu, Lübeck, Pulau Mozambik, Ormus/Hormuz, Pemba, Venesia, Zanzibar, dll. • Pelabuhan tersibuk di dunia (berdasarkan volume) didasarkan berada pada pulau-pulau kecil: Shanghai, Singapura, Tianjin, Rotterdam, Guangzhou, Ningbo-Zhoushan, Busan, dan Hong Kong.	Ibu kota negara, pusat yurisdiksi subnasional yang secara substansial otonom seluruhnya atau sebagian besar berbasis atau didirikan di pulau-pulau kecil Pusat perdagangan pulau kecil memainkan peran kunci dalam pergerakan produk, orang, dan ide; Pelabuhan tersibuk di dunia (berdasarkan volume) berada pada pulau-pulau kecil
--	--	--	--	--	---

2.	Alvaryan Maulana and Tania Benita	2017	Typologi of Island City in Indonesia, IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 79 (2017) 012026	Kota Sabang, Kota Batam, Kota Tanjungpinang, Bintan, Kota Pangkal Pinang, Kota Denpasar, Kota Mataram, Kota Bima, Kota Kupang, Kota Tarakan, Kota Ternate, Kota Ambon,	Tipologi khas kota pulau yang dapat ditemukan di Indonesia yaitu: <i>Island city which located on group of small island, scattered</i> (Batam, Bintan) <i>Island city which located on a single island. This island city occupy entire/ most of the island as its territory</i> (Sabang, Tarakan, Ternate, Ambon) <i>Island city which located in relatively-large small island and share the ownership of the island with other regions</i> (Tanjungpinang, Pangkal Pinang, Denpasar, Mataram, Bima, Kupang)
3.	Gang Hong	2017	Locating Zhuhai between land and sea: a relational production of Zhuhai, China, as an island city, <i>Island Studies Journal</i> , 12(2), pp. 7-24	Zhuhai, China	Karakteristik lainnya adalah hubungan kota antara spasialitas pulau kota dan pembentukan kota, konfigurasi darat-laut, dan sifat ruang publik perkotaan antara darat dan laut
4.	Grydehøj, A., and Kelman, I.	2016	Island smart eco-cities: Innovation, secessionary enclaves, and the selling of sustainability. <i>Urban Island Studies</i> , 2, 1-24.	New-build smart eco-cities of Dongtan/Chongming and Caofeidian Eco-City (China), Forest City (Malaysia), Västra Hamnen (Sweden), Saadiyat Island (Abu Dhabi), Songdo International Business District (South Korea), Eko Atlantic (Nigeria), and Ørestad (Denmark).	Konsep lain yang mengemuka sebagai kecenderungan baru adalah kota baru yang dibangun cerdas, kota ramah lingkungan di pulau kota kecil. Namun konsep pulau kota yang cerdas justru menciptakan fungsi sebagai kantong pemisahan untuk elit global, mengistimewakan privat daripada kepentingan publik
5.	Grydehøj, A.	2015	Making Ground, Losing Space: Land Reclamation and Urban Public Space in Island Cities, <i>Urban Island Studies</i> , 1, 96-117	Bahrain, Copenhagen, Dubai, Hong Kong, Macau, New York City, and Xiamen	Keterbatasan lahan juga memunculkan konsep pembangunan pulau kecil yaitu melalui reklamasi. Tujuannya tidak lain untuk membangun ruang dengan fungsi-fungsi industri, perumahan, dan rekreasi perkotaan sambil menghindari konflik sosial yang sering menyertai upaya pembaruan perkotaan.
6.	Anis Chowdhury	2008	Growth Oriented Macroeconomic Policies for Small Islands Economies Lessons from Singapore WIDER Research Paper, No. 2008/47, ISBN 978-92-9230-095-1, The United Nations University World Institute for Development Economics Research (UNU-WIDER), Helsinki	Singapura	Meskipun beberapa ekonomi pulau kecil telah berhasil dalam menghasilkan pertumbuhan cepat yang berkelanjutan dan mengurangi kemiskinan, sebagian besar memiliki pertumbuhan yang suram kinerja, mengakibatkan tingginya pengangguran dan kemiskinan. Meskipun makroekonomi kebijakan memainkan peran penting dalam pertumbuhan dan pengurangan kemiskinan, telah terjadi sangat sedikit pekerjaan pada masalah untuk ekonomi pulau kecil atau negara mikro. Sebagian besar pekerjaan mengikuti kerangka konvensional dan tidak menemukan atau sangat sedikit efektivitas makroekonomi
7.	Kumar & Stauvermann	2023	Tourism and economic growth in the Pacific region: evidence from five small island economies	Fiji, Samoa, Kepulauan Solomon, Tonga, Vanuatu	Sektor pariwisata memiliki dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi pulau-pulau kecil, keberadaan kawasan wisata akan meningkatkan daya tarik wilayah dan investasi asing langsung (Foreign Direct Investment/FDI) dan memberikan dampak terhadap pertumbuhan wilayah di Fiji, Samoa, Kepulauan Solomon, Tonga, dan Vanuatu.
8.	Adedoyin et al.	2023	The Effect of Tourism Taxation on International Arrivals to a Small Tourism-Dependent Economy	Maladewa	Sektor pariwisata memiliki andil besar terhadap pendapatan negara di Maladewa, pajak pariwisata berkontribusi sebesar 70% dari total pendapatan negara ini yang kemudian digunakan untuk memperbaiki defisit anggaran. Berdasarkan kajian ini dapat dijelaskan bahwa sektor pariwisata merupakan sektor yang sangat

					potensial bagi pengembangan wilayah pulau-pulau kecil, pendapatan yang berasal dari kegiatan pariwisata akan dapat berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah pulau-pulau kecil.
9.	Syahputra <i>et al.</i>	2024	Manfaat Transportasi Kapal Feri Untuk Pertumbuhan Ekonomi Pada Kawasan Pulau Terluar, Dan Efek Pemberian Subsidi Dari Pemerintah	Wilayah kepulauan terluar di Indonesia	Bantuan subsidi pemerintah mampu memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi khususnya pada pengembangan sektor wisata. Pada kajian ini dijelaskan studi kasus terkait subsidi operasional kapal feri sebagai moda transportasi pennghubung antar pulau dan penunjang bagi pariwisata kepulauan, melalui subsidi ini dapat membantu keberlanjutan operasional dalam jangka panjang dan mengurangi beban biaya bagi masyarakat.
10.	Adrian Rihaksa & Susanti	2023	Penyuluhan Pentingnya Peran Infrastruktur Dalam Permintaan Pariwisata Internasional Indonesia	Indonesia	Keberadaan infrastruktur atau sarana dan prasarana penunjang memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan pariwisata terutama di wilayah pulau-pulau kecil, ketersediaan infrastruktur baik secara kuantitas maupun kualitas juga akan dapat berpengaruh terhadap permintaan pariwisata tingkat internasional. Kelayakan sebuah kawasan wisata ditentukan dari kelengkapan sarana dan prasarana pendukungnya.
11.	Anckar	2007	Archipelagos and Political Engineering: The Impact of non-Contiguity on Devolution in Small States	Negara-negara kepulauan kecil	Pembentukan kedaulatan negara-negara kepulauan akibat kondisi geografis yang tidak berdekatan satu sama lain.
12.	Baldacchino	2014	Lessons from the Political Economy of Small Islands: The Resourcefulness of Jurisdiction. Basingstoke: Macmillan	Pulau-pulau kecil di Atlantik Utara	Kondisi yuridiksi pulau-pulau kecil dan kebijakan ekonomi politik pulau kecil.
13.	Baldacchino, G., & E.C.D. Ferreira	2013	'Competing Notions of Diversity in Archipelago Tourism: Transport Logistics, Official Rhetoric and Inter-Island Rivalry in the Azores'	Kepulauan Azores	Strategi negara kepulauan kecil dalam mendorong ekonomi melalui industri pariwisata.
14.	Baldacchino & Tsai, 2014	2014	'Contested Enclave Metageographies: The Offshore Islands of Taiwan'	Pulau-pulau lepas pantai Taiwan	Kondisi geopolitik pulau-pulau lepas pantai Taiwan
15.	Bartmann	2006	In or Out: Sub-National Island Jurisdictions and the Antechamber of Para-Diplomacy'	Kawasan kepulauan sub nasional	Yuridiksi kawasan kepulauan
16.	Coddington et al	2012	Embodied Possibilities, Sovereign Geographies and Island Detention: Negotiating the 'Right to have Rights' on Guam, Lampedusa and Christmas Island'	Guam, Lampedusa, Christmas Island	Konsep hak untuk memiliki hak dalam kedaulatan negara dan menciptakan ruang politik baru bagi negara negara pulau
17.	Karlsson	2009	Sub-National Island Jurisdictions as Configurations of Jurisdictional	Kepulauan Aland, Kepulauan Faroe, Greenland	Hubungan antara kekuasaan yuridiksi (otonomi politik) dengan kapasitas ekonomi wilayah pulau sub nasional.

			Powers and Economic Capacity: Nordic Experiences from Åland, Faroes and Greenland'		
18.	Loyd & Mountz	2014	'Managing Migration, Scaling Sovereignty on Islands'	Wilayah pulau-pulau Mediterania	Hubungan antara krisis kedaulatan, migrasi, dan wilayah pulau-pulau kecil (geopolitik).
	Mountz	2014	'Political Geography II: Islands and Archipelagos'	Wilayah pulau-pulau kecil dan kepulauan	Kondisi geopolitik dan ontologi spasial kekuasaan pulau-pulau kecil yang dipahami sebagai konsep politik yang mempengaruhi dinamika kekuasaan dan teritorialitas.
19.	Baldacchino	2006	Managing the Hinterland Beyond: Two Ideal-Type Strategies of Economic Development for Small Island Territories'	Kawasan Pulau-pulau Kecil	Strategi ideal bagi Perekonomian pulau-pulau kecil
20.	Bertram & Watters	1985	The MIRAB Economy in South Pacific Microstates'	Negara-negara pulau kecil Pasifik Selatan	Dinamika ekonomi negara-negara mikro di Pasifik Selatan "MIRAB". Ketergantungan terhadap migrasi tenaga kerja dan remitansi, serta bantuan luar negeri dan ekspansi sektor publik dalam perekonomian.
21.	Briguglio et al.	2010	Profiling Vulnerability and Resilience: A Manual for Small States.	St. Lucia, Seychelles, Vanuatu	Tingkat kerentanan dan ketahanan negara-negara kecil serta kebijakan ekonomi yang dapat diterapkan untuk menghadapinya.
22.	Connell	2013	Islands at Risk?: Environments, Economies and Contemporary Change.	Kawasan Karibia, Pasifik dan Samudera Hindia.	Perubahan kondisi ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan pulau-pulau kecil.
23.	Kakazu	2012	Island Sustainability: Challenges and Opportunities for Okinawa and other Pacific Islands in a Globalized World.	Okinawa dan kepulauan Pasifik	Keberlanjutan pulau pada sektor ekonomi.
24.	Karides	2013	Riding the Globalization Wave (1974-2004): Islandness and Strategies of Economic Development in Two Post-colonial States'	Republik Siprus dan Republik Trinidad dan Tobago	Strategi pembangunan ekonomi dua negara kepulauan pasca kolonial.
25.	Atkinson, et al.	1997	Measuring Sustainable Development: Macroeconomics and the Environment,	Negara-negara pulau-pulau kecil	Upaya pembangunan pulau kecil melalui pertumbuhan ekonomi.
26.	Archer	1982	The value of multipliers and their policy implications, Tourism Management,	Negara-negara pulau-pulau kecil	Pembangunan pulau kecil melalui pariwisata.
27.	Kumar & Stauvermann	2023	Tourism and Economic Growth in the Pasific region: Evidence from five small island economies	Pasifik	Dampak investasi asing langsung dalam pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi.
	Adenoyin et al	2023	The Effect of Tourism Taxation on	Maladewa	Kontribusi pajak pariwisata terhadap pendapatan wilayah pulau-pulau kecil.

			International Arrivals to a Small Tourism-Dependent Economy		
28.	Branchoux, Fang, & Tatenio	2018	Estimating infrastructure financing needs in the Asia-Pacific least developed countries, landlocked developing countries, and small island developing states.	Kawasan pulau-pulau kecil di Asia-Pasifik, negara kepulauan kecil berkembang (SIDS)	Bantuan pengembangan infrastruktur kebutuhan dasar.
29.	Ririhena, Rhoni E	2007	Model Sistem Pertanian berkelanjutan di Wilayah Pulau-pulau kecil	Pulau-pulau kecil di Maluku	Pembangunan pertanian dan peternakan serta perikanan dalam perekonomian pulau-pulau kecil
30.	Carnero Lorenzo	2016	A Compared Prespective of Small Africa Island Economies.	Pulau-pulau Kecil di Afrika	Keterbatasan aksesibilitas menciptakan kerentanan perekonomian pulau-pulau kecil serta distorsi dari luar.
31.	Dewa Prabawa & Zebua	2024	Eksplorasi dan Pemahaman Tantangan dalam Pengembangan Ekonomi di Provinsi Kepulauan	Wilayah provinsi kepulauan	Konektivitas dan aksesibilitas wilayah kepulauan dan pulau-pulau kecil merupakan hal mutlak dalam menangani masalah keterbelakangan wilayah.
32.	Currie	2018	Tourism and emerging island economies: An understanding of stakeholder perspectives in Timor-Leste.	Timor-Leste	Peran pemerintah dalam seleksi investasi terhadap perekonomian wilayah pulau-pulau kecil.
33.	Balcilar, Kutan & Yaya	2017	Testing the dependency theory on small island economies: The case of Cyprus.	Cyprus	Pemenuhan kebutuhan pokok pulau kecil dapat dilakukan melalui luar pulau melalui ekspor dan impor.
34.	Cavusoglu	2016	Knowledge Economy and North Cyprus. Procedia Economics and Finance	Cyprus	Transfer teknologi mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi pulau kecil dan memperkuat independensi pada sektorn sosial, transformasi teknoloi dan budaya.
Deep Ecology (Kawasan konservasi, Partisipasi publik, Perubahan Iklim, Ekologi politik/proses perencanaan, Prioritas ekologi)					
1.	Farhan, A. R., and Lim, S.,	2014	Integrated Vulnerability Assessment on Small Island Regions Towards Integrated Coastal Zone Management (ICZM): A Case Study of Thousand Islands, Indonesia International Journal of Geoinformatics, Vol. 10, No. 4, December, 2014. ISSN 1686-6576 / © Geoinformatics International	Thousand Islands, Indonesia	Wilayah pulau kecil kota memiliki keberlanjutan dalam perspektif sosial dan ekonomi, namun tidak dari perspektif lingkungan, justru mengalami kerusakan. Dinamika perubahan akibat pembangunan yang terjadi, ambiguitas dan ketidakberdayaan penegakan hukum telah menyebabkan kerusakan lingkungan sampai batas tertentu pada pulau kota kecil. Karena itu, diperlukan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta partisipasi publik, untuk melakukan upaya pemantauan, mengevaluasi, dan (jika mungkin) membangun kembali lingkungan wilayah pulau kecil yang rusak tersebut
2.	Fathimath Ghina	2003	Sustainable Development in Small Island Developing State, Environment,	Maldives	Pembangunan berkelanjutan di negara-negara berkembang pulau kecil (<i>Small Island Development State</i>), dengan kasus di Maladewa, sebagai negara berkembang pulau kecil di Samudera Hindia Tengah.

			Development and Sustainability 5: 139–165, 2003. © 2003 Kluwer Academic Publishers. Printed in the Netherlands		Maladewa menghadapi banyak tantangan dan kendala dalam mengejar pembangunan berkelanjutan karena kerapuhan ekologisnya dan kerentanan ekonomi. Isu terkait kerentanan lingkungan menjadi perhatian terbesar. Lingkungan yang sehat adalah dasar dari semua sistem pendukung kehidupan, termasuk kesejahteraan manusia dan pembangunan sosial-ekonomi. Masalah lingkungan yang menjadi prioritas di Maladewa adalah: perubahan iklim dan kenaikan permukaan laut, ancaman terhadap keanekaragaman hayati, ancaman terhadap sumber daya air tawar, degradasi lingkungan pesisir, polusi, energi dan pariwisata. Di antaranya, perubahan iklim dan dampak terkaitnya diperkirakan akan terjadi ancaman terbesar bagi lingkungan dan oleh karena itu bagi pembangunan berkelanjutan. Untuk pulau-pulau kecil tergantung pada ekosistem laut yang rapuh, khususnya pada terumbu karang, untuk mata pencaharian dan ruang hidup, efek buruk perubahan iklim seperti peningkatan frekuensi kejadian cuaca ekstrem dan kenaikan permukaan laut akan memperburuk tantangan yang sudah dihadapi.
3.	Robinson <i>et al.</i>	2022	A new framework for rapidly assessing national adaptation policies: an application to small island developing states in the Atlantic and Indian Oceans	Atlantic, Indian Oceans, Mediterranean and South China Seas (AIMS) region	Permaalahan dan isu perubahan iklim telah menjadi isu prioritas pembangunan di banyak negara dan diasosiasikan dengan masalah prioritas lain seperti kemiskinan, banyak negara mulai mengadaptasi kebijakan perencanaan mereka dengan memasukkan isu perubahan iklim sebagai salah satu isu prioritasnya.
4.	Islam <i>et al.</i>	2023	Climate change versus livelihoods, heritage and ecosystems in small Island states of the Pacific: a case study on Tuvalu	Tuvalu	Perubahan iklim akibat pemanasan global yang terjadi di Tuvalu berdampak terhadap terjadinya krisis kesehatan, ancaman pada ketersediaan pangan, ketidakseimbangan alam dan ekosistem, dan bencana alam yang umumnya memang terjadi secara global yang pada akhirnya berpengaruh terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat terutama pada kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil
5.	Pathak <i>et al.</i>	2021	Impacts of climate change on the tourism sector of a Small Island Developing State: A case study for the Bahamas	Bahama	Pada sektor pariwisata, bencana alam akibat perubahan iklim juga akan meningkatkan kerentanan kerusakan infrastruktur pariwisata yang konsekuensinya akan menyebabkan kerugian bagi pendapatan masyarakat dan hilangnya lapangan pekerjaan yang secara tidak langsung juga akan berdampak terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat seperti yang terjadi di Bahama
6.	Johnson, H.	2016	Encountering Urbanization on Jersey: Development, Sustainability, and Spatiality in a Small Island Setting', Urban Island Studies, 2, forthcoming	Jersey UK	Perubahan iklim dan dampak terkaitnya menjadi ancaman terbesar bagi lingkungan pulau kecil. Di samping itu, pengembangan kota pulau dan kesadaran akan keberlanjutan dicirikan dan dipraktikkan sangat tergantung pada ketersediaan keuangan dan pariwisata
7.	Virgilio Maguigad, David King, & Alison Cottrell,	2015.	Island Tourism Planning, and Climate Change Adaptation on Boracay, Philippines, Urban Island Studies , 1, 152- 179, DOI: 10.20958 / uis.2015.	Boracay, Philippines	Salah satu pendekatan dalam mengatasi kerusakan lingkungan pulau kecil adalah pendekatan ekologi politik untuk adaptasi perubahan iklim. Proses perencanaan pulau kota mengharuskan adanya hubungan yang baik di antara para pemangku kepentingan. Realisasi hubungan baik ini harus diintegrasikan ke dalam politik proses pengambilan keputusan yang melibatkan para pemangku kepentingan. Pendekatan ekologi politik dapat digunakan sebagai instrumen untuk mempelajari dinamika iklim mengubah adaptasi dan urbanisasi pariwisata di pulau-pulau kecil

8.	R. Rijanta	2005	Insularitas dan Keterbelakangan Ekonomi Wilayah Menuju Model Konseptual Perkembangan Wilayah Pulau Kecil di Indonesia, Majalah Geografi Indonesia, Volume 19, Nomor 2 September 2005	Indonesia	Wilayah pulau kecil mengalami keterbelakangan ekonomi karena takdir kondisi wilayah yang tidak memungkinkan bekerjanya elemen-elemen sosial, politik dan demografi serta keruangan secara sinergis dalam pembangunan. Setiap elemen wilayah bahkan cenderung bekerja saling negasi terhadap elemen lainnya, sehingga dalam upaya pengembangan wilayah pulau-pulau kecil banyak sekali dilema dan paradoks yang tidak mudah dicari komprominya. Faktor fisik wilayah merupakan kendala terbesar yang menurunkan berbagai masalah pembangunan di wilayah pulau kecil. Pembangunan wilayah pulau-pulau kecil hendaknya menempatkan keberlanjutan kehidupan wilayah dan integritas ekologis sebagai tujuan penting. Orientasi pertumbuhan ekonomi dalam pembangunan tampaknya harus ditempatkan pada prioritas yang rendah
9.	Sovacool	2021	Who are the victims of low-carbon transitions? Towards a political ecology of climate change mitigation.	-	Ekologi politik menggambarkan proses pembangunan berkelanjutan atau mitigasi.
Resources Balance (Pembangunan Berkelanjutan, Community Based Development/Local Economic Development, Agromarine, Integrated Coastel Zone Management/ICZM, Pesisir Terpadu, Blue Economy)					
1.	Sofia Karampela, Charoula Papazoglou, Thanasis Kizos, and Ioannis Spilanis,	2017	Sustainable local development on Aegean Islands: a meta-analysis of the literature, Island Studies Journal, Vol. 12, No. 1, 2017, 71-9).	Kepulauan Aegean Yunani (Crete, Lesvos, Rodos, Chios, Samos, Ikaria, Limnos, Paros, Andros, Naxos, Kalymnos, Kos, Santorini, Mykonos, Syros, Leros, Skiathos, Skyros, Ios, Milos, Sifnos, Astypalea, Tilos, Symi, Oinousses, Fourmoi, Nisyros, Antiparos, Patmos, Ag. Efstratios, Psara, Donoussa, Thirasia, Chalki, Gavdos, Antikythera)	Terjadinya pembangunan cenderung mengeksploitasi tanpa memperhatikan keberlanjutan pada aspek lingkungan, ekonomi, sosial dan institusi Pembangunan yang memperhatikan keberlanjutan aspek ekologis sosial ekonomi dan kelembagaan Pembangunan dengan meminimalkan kerusakan dan pencemaran lingkungan Pembangunan yang memberikan kesejahteraan masyarakat Pembangunan yang merata Pembangunan yang mempertahankan terjaganya keberlanjutan pembangunan baik dari aspek ekologis, sosial, ekonomi, budaya, dan kelembagaan Pembangunan yang memperhatikan kebutuhan saat ini tanpa mengancam ketersediaan kebutuhan di masa depan Terjadinya ketidaksesuaian pembangunan akibat kurangnya aspirasi masyarakat Pembangunan yang memperhatikan aspirasi masyarakat lokal, menggunakan sumberdaya lokal, dan berorientasi memakmurkan masyarakat lokal Kemendirian masyarakat Meningkatkan kapasitas lokal, program pelatihan/transfer teknologi Penyampaian aspirasi dari masyarakat Peningkatan pengetahuan mengenai potensi lokal dan wawasan lingkungan masyarakat Peningkatan keterampilan dan kualitas masyarakat Sistem pengawasan pembangunan berbasis masyarakat Masyarakat yang mandiri Pelibatan masyarakat lokal dalam pembentukan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan
2.	Rokhmin Dahuri	2000	Kebijakan Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil dalam Prespektif Pembangunan Berkelanjutan. ALAMI. Vol. 5(2) : 1-3	Pulau-pulau Kecil Indonesia	Pendekatan pembangunan pulau-pulau kecil berbasis agromarine yang kegiatan utamanya bertumpu pada kegiatan pendayagunaan sumber daya laut (penangkapan ikan, budidaya laut, industri pengolahan laut) yang dikombinasikan dengan kegiatan pertambangan dan pertanian dalam arti luas. Pada perkembangannya konsep ini diperluas dengan memasukkan kombinasi dari pendayagunaan jasa-jasa lingkungan kelautan (pariwisata bahari).

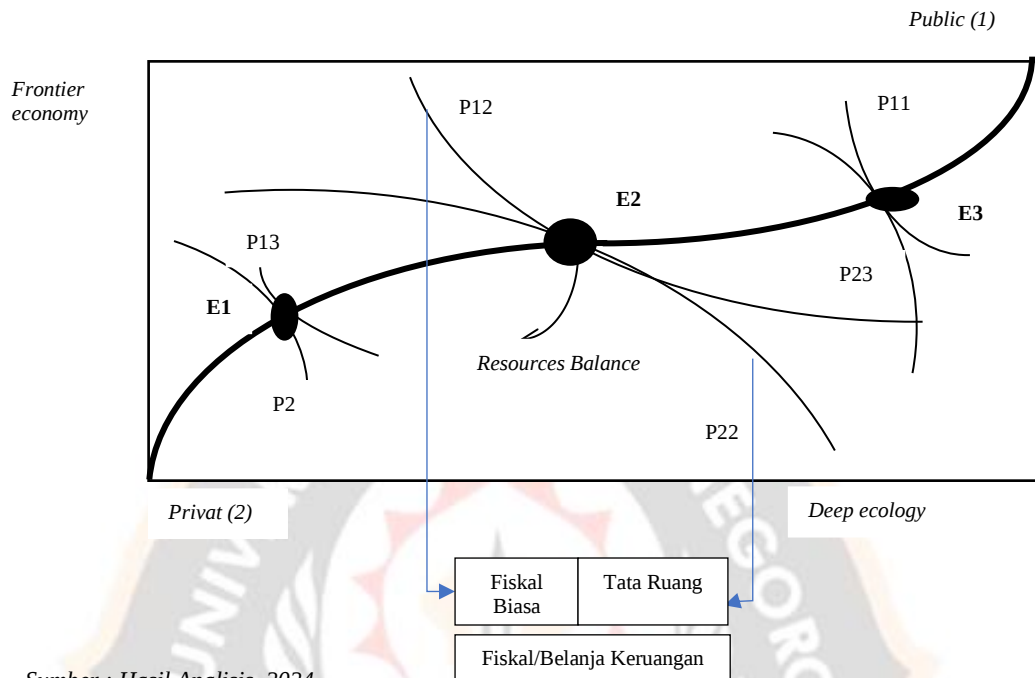
					Adapun dasar yang menyangga konsep ini adalah 1) kesesuaian dan daya dukung lingkungan, 2) pendekatan agribisnis, 3) pendekatan kemitraan. Ketiganya harus diterapkan sebab akan menciptakan keberlanjutan pada dua sisi, yaitu ekologis dan ekonomis
3.	Deboudt, Dauvin & Lozachmeur	2008	Recent developments in coastal zone management in France	Kawasan pesisir Prancis	Pembangunan dan pengelolaan pulau kecil perlu memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan, ekologi politik dilaksanakan dengan penerapan ICZM sebagai upaya pengelolaan pulau kecil.
4.	Mark D. Griffith dan Ashe, John	1993	Sustainable Development of Coastal and Marine Areas in Small Island Developing States : A Basis for Integrated Coastal Management, 21, 269–284.	Small Island Developing States	Konsep <i>Integrated Coastal Zone Management</i> (ICZM) sebagai bagian dari upaya pengelolaan pulau kecil. Fokus ICZM sendiri bukan hanya berhenti pada konservasi sumber daya alam saja tetapi juga meliputi upaya mitigasi dampak perubahan iklim. Konsep perencanaan pulau kecil secara terpadu (ICZM) memiliki peran penting dalam perencanaan pembangunan dalam mengatasi berbagai permasalahan yang ada di wilayah pesisir dan pulau kecil, salah satunya melalui penilaian dan analisis kerentanan wilayah tersebut terhadap berbagai bencana maupun dampak dari kegiatan wisata dan pembangunan lain yang mungkin terjadi. Pembangunan lebih berorientasi darat menyebabkan pembangunan di wilayah pesisir termarginalkan. Pembangunan memiliki fokus keterpaduan baik pada keterpaduan wilayah/ekologism sektor, disiplin ilmu dan keterlibatan pemangku kepentingan. Kesatuan wilayah pesisir dilihat dari berbagai aspek terutama lingkungan. Pembangunan berbasis hubungan saling terkait antara kondisi fisik, sosial ekonomi dan politik dalam lingkungan pesisir yang dinamis. Pembangunan harus meliputi tahap penataan dan perencanaan, formulasi, implementasi, dan evaluasi untuk menjawab isu, permasalahan, peluang dan tantangan di kawasan pesisir. Pembangunan kawasan pesisir yang terpadu dan berkelanjutan.
5.	Sridhar <i>et al.</i>	2020	Small island management: a case study of the Smith Island, North Andaman, India	Smith Island, North Andaman, India	Integrated Island Management (IIM) yang diterapkan di Pulau Smith, Andaman Utara, India dalam dokumen rencananya memuat tentang analisis kondisi eksisting penggunaan lahan dan tutupan lahan, kawasan ekologi sensitif, daya dukung pembangunan dan persepsi bahaya pada pulau ini. Dalam rencananya juga mencakup tentang penentuan kawasan yang dapat dikembangkan dan tidak dapat dikembangkan, kawasan budidaya dan konservasi, serta arahan pengembangan ekowisata.
6.	Calado	2007	Integrated Coastal Zone Management Strategies on Small Islands	Kepulauan Azores dan Madeira di Portugal serta Kepulauan Kanari di Spanyol, Kepulauan Mikronesia di Pasifik	Penerapan konsep ICZM pada pulau-pulau kecil di Kepulauan Mikronesia Azores dan Madeira di Portugal serta Kepulauan Kanari di Spanyol berpendapat bahwa perencanaan dengan berbasis ICZM ini dianggap sebagai sebuah langkah awal yang positif, namun hal lain yang perlu diperhatikan terkait tata kelola pemerintahan, partisipasi masyarakat dan kesadarannya terhadap permasalahan-permasalahan yang ada pada kawasan pulau-pulau kecil menjadi hal penting. Menurutnya, pengembangan kawasan pulau-pulau kecil membutuhkan strategi khusus bahwa perencanaannya tidak dapat disamakan dengan wilayah-wilayah pada umumnya. Berdasarkan studi kasus di kepulauan mikronesia, perencanaan tata ruang menjadi instrumen yang mampu mengendalikan pengelolaan dan penggunaan lahan secara lebih jelas, tidak hanya sampai di sini bahwa masyarakat juga harus teredukasi terhadap hal ini.

7.	Martínez-Vázquez <i>et al</i>	2021	Challenges of the Blue Economy: evidence and research trends	-	Implementasi konsep Blue Economy atau Ekonomi Biru dalam pengelolaan wilayah pulau-pulau kecil mungkin menjadi strategi yang paling relevan dengan model ini. Bahwa konsep Blue Economy merupakan upaya peningkatan ekonomi, kehidupan dan inklusi sosial masyarakat dengan tetap memerhatikan kelestarian lingkungan dan sumber daya kelautan, konsep ini akan menjamin terciptanya keberlanjutan lingkungan dan efisiensi pengelolaan sumberdaya kelautan
8.	Hassanali	2019	CARICOM and the blue economy - Multiple understandings and their implications for global engagement	Negara-negara CARICOM (Kepulauan Karibean)	Penerapan <i>Blue Economy</i> pada negara-negara SIDS dan CARICOM memberikan dampak positif secara kolektif baik dari sisi ekonomi, sosial dan ekologi.
9.	Nakatani	2019	A Possible Approach to Fiscal Rules in Small Islands — Incorporating Natural Disasters and Climate Change	Negara-negara kepulauan kecil	Aturan fiskal dalam perekonomian pulau-pulau kecil.
10.	Murinde dan Rarawa	1996	Tourism and economic growth in the Pacific region: evidence from five small island economies	Lima pulau kecil di wilayah Pacific	Pembangunan pulau kecil melalui subsidi pemerintah pusat
11.	Darajati	2023	Ekonomi Biru: Peluang Implementasi Regulasi Di Indonesia	Indonesia	Blue Economy dapat menjadi peluang bagi sumber pendapatan wilayah-wilayah pesisir dan kepulauan di Indonesia sebagai salah satu strategi untuk mewujudkan diri menjadi poros maritim dunia. Dalam konteks pengelolaan pulau-pulau kecil dan terluar dengan berbagai keterbatasannya, konsep ini memungkinkan diterapkan. menciptakan pembangunan yang berbasis resources balance approach.
12.	March <i>et al.</i>	2023	Challenges when designing blue bond financing for Small Island Developing States	Kepulauan Bahama	Blue Bonds atau obligasi biru menjadi salah satu opsi pembiayaan fiskal yang dilakukan dalam implementasi Blue Economy dalam pengembangan wilayah pulau-pulau kecil di Kepulauan Bahama dijelaskan bahwa sektor pariwisata, potensi angin lepas pantai, tenaga pasang surut dan gelombang, serta kawasan konservasi air serta kekayaan alam memiliki potensi yang besar untuk penerapan konsep ini, kemudian sektor perikanan tangkap dan transportasi menjadi juga memiliki potensi yang cukup menjanjikan.
13.	Sridhar et al	2020	Small island management: a case study of the Smith Island, North Andaman, India.	Andaman Utara, India	Perencanaan kawasan pesisir dan kepulauan perlu mencakup penentuan kawasan budidaya dan konservasi serta aragan pengembangan ekowisata.
14.	Calado et al	2007	Integrated Coastal Zone Management Strategies on Small Islands	Wilayah pulau-pulau kecil	Penerapan konsep ICZM dianggap sebagai langkah yang positif dengan mengintegrasikan tata kelola pemerintahan, partisipasi masyarakat, dan perencanaan tata ruang yang baik.
15.	Nowak et al	2023	Spatial Planning Response to the Challenge of Climate Change Adaptation: An analysis of selected instruments and good practice in Europe	Eropa	Perencanaan tata ruang merupakan instrumen pengendalian pengelolaan penggunaan lahan yang perlu diintegrasikan dengan kajian iklim dan strategi-strategi adaptasinya.
16.	Hadi	2005	Dimensi Lingkungan Perencanaan dan Pembangunan	Indonesia	Pertumbuhan ekonomi tetap diperlukan tetapi dengan strategi yang memuat aspek lingkungan sebagai pembangunan yang berkelanjutan.

17.	Fauzel & Tandrayen-Ragoobur	2023	Sustainable development and tourism growth in an island economy: a dynamic investigation.	Wilayah kepulauan	variabel pembangunan berkelanjutan (ekonomi: ketenagakerjaan dan kesejahteraan), sosial (inklusi sosial), dan lingkungan (efisiensi penggunaan sumberdaya alam dan energi) memiliki kontribusi bagi peningkatan sektor pariwisata dalam jangka panjang.
18.	Martínez-Vázquez et al	2021	Challenges of the Blue Economy: evidence and research trends.	-	Konsep blue economy menjamin terciptanya keberlanjutan dan efisiensi pengelolaan sumberdaya kelautan.
19.	Hassanali	2020	CARICOM and the blue economy – Multiple understandings and their implications for global engagement.	Negara negara CARICOM (Kepulauan Karibia)	Konsep <i>blue economy</i> mampu menciptakan keuntungan kolektif dari sisi ekonomi, sosial, dan ekologi.
20.	Drajati	2023	Ekonomi Biru: Peluang Implementasi Regulasi Di Indonesia	Indonesia	<i>Blue economy</i> dapat menjadi peluang bagi sumber pendapatan wilayah pesisir dan kepulauan sebagai strategi mewujudkan poros maritim dunia.
21.	Gani, A	1998	Macroeconomic determinants of growth in the South Pacific island economies, Applied Economics Letters, 5, 747–9.	Fiji South Pasifik	Bantuan subsidi pemerintah pusat sebagai bentuk dari fiskal pengeluaran, merupakan sumber pertumbuhan ekonomi penting untuk beberapa negara kecil pulau. Dampak penganda fiskal sangat bergantung pada pemerintah pusat Bantuan subsidi pemerintah sebagai bagian dari kebijakan fiskal, ini lebih banyak diilhami oleh pendapat John Maynard Keynes (1930) dalam bukunya <i>The General Theory of Employment, Interest, and Money</i> mengenai permintaan agregat. Pertumbuhan ekonomi kawasan pulau-pulau kecil digerakkan oleh adanya kenaikan dalam permintaan pada pasar barang, pasar uang, pasar tenaga kerja dengan melibatkan sisi pengeluaran (pasar output) dan sisi penerimaan (pasar faktor produksi). Dalam hal ini dinyatakan kebijakan fiskal (pasar output) melalui pembelanjaan konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah yang bertambah akan menyebabkan tambahan kapasitas produksi. Penambahan kapasitas produksi ini akan mempengaruhi permintaan pada faktor produksi. Melalui proses multiplier akan tercipta tambahan aktivitas ekonomi yang mencerminkan peningkatan kesejahteraan
22.	March et al	2023	Challenges when designing blue bond financing for Small Island Developing States.	SIDS	<i>Blue Bonds</i> atau obligasi biru merupakan salah satu opsi pembiayaan fiskal dalam implementasi <i>blue economy</i> dalam pembangunan pulau kecil.
23.	Samsul Ma'rif	2025	Penerapan Fiskal Keruangan dalam Rangka Pengembangan Wilayah Pulau kecil Perbatasan yang berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau	Kabupaten Kepulauan Anambas	Belanja pemerintah sebagai stimulan pembangunan wilayah pulau-pulau kecil perbatasan perlu memperhatikan daya dukung lingkungan

Sumber : Hasil Analisis, 2025

Berdasarkan rangkuman perspektif teori di atas, maka dapat digambarkan posisi penelitian dalam konstelasi perspektif teoritis sebagai berikut:



Sumber : Hasil Analisis, 2024

Keterangan:

- P11, P1, P13 perspektif lingkungan (ekologi politik, partisipasi publik, perubahan iklim, prioritas ekologi, konservasi)
- P21, P22, P3 perspektif ekonomi (pariwisata, kota cerdas, kota baru reklamasi, fiskal konvensional, infrastruktur, sentra pertanian/peternakan/perikanan)
- E1, E2, E3 pembangunan berkelanjutan (keseimbangan sumberdaya, pembangunan ekonomi lokal, CBM/CBD, ICZM/pengelolaan pesisir terpadu, agromarine, networking system)

Gambar 2. 2
Perspektif Lingkungan, Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan

SEKOLAH PASCASARJANA